



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS IB

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

20 25

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS IB



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Enim, 2 Februari 2026

Pereviu I



(Hendrik, SH)

Pereviu II



(Arman, SH)

KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, atas izin Nya “*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025*” telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2025.

Muara Enim, 2 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ARI QURNIAWAN, SH, MH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2025-2029 telah menetapkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung**”. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan

masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang padagilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak di uraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah lakubirokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.



Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2025.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2025 yaitu :



1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,353,495,000,-	Rp. 3,229,614,896,-	96.31 %
2	Belanja Barang	Rp. 1,282,131,000,-	Rp. 1,277,409,304,-	99.63 %
3	Belanja Modal	Rp. 48,000,000,-	Rp. 48,000,000,-	100 %

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp. 358,940,000,-	Rp. 355,669,050,-	99.09 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2025 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2025 :

SASARAN STRATEGIS I :

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %	98,6 %	109,4 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara	100%	100%	100%



		pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.			
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	86,21%	107,76%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	66,67%	133,34 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8,38 %	104,75 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	3,23%	161,5%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%	25%	250 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis I					113,50

**SASARAN STRATEGIS II :
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,98	110,5
Rata-rata capaian Sasaran Strategis II					110,5



SASARAN STRATEGIS III :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71	79,52	112
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90	98,55	109,5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	92,5	132,14
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,23	107,7
Rata-rata capaian Sasaran Strategis III					115,34



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GRAFIK	13
BAB I Pendahuluan.....	18
A. Latar Belakang	18
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	19
C. Struktur Organisasi.....	20
D. Isu-Isu Strategis.....	22
E. Sistematika Penyajian.....	24
BAB II Perencanaan Kinerja.....	26
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	26
1. Visi dan Misi	26
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	27
B. Indikator Kinerja Utama	30
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi RENSTRA.....	32
D. Perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 (Setelah Revisi Renstra).....	39
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	44
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	49
B. Realisasi Anggaran.....	99
C. Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja.....	103
D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	107
D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	109
BAB IV Penutup.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115



LAMPIRAN

1. **Ceklist Reviu**
2. **Indikator Kinerja Utama**
3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**
4. **Matriks Rencana Strategis 2025-2029**
5. **SK Tim Penyusunan Restra**
6. **SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
7. **SK Tim penyusunan IKU**



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2025
- Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2025
- Tabel 3. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2025
- Tabel 4. Pengukuran Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Tabel 5. Jumlah perkara yang putus dan Salinan putusan yang dikirimkan Kepada para pihak pada tahun 2025
- Tabel 6. Jumlah putusan dan Salinan putusan perdata yang dikirim para pihak selama Tahun 2020-2025
- Tabel 7. Jumlah putusan dan Salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak Selama tahun 2020-2025
- Tabel 8. Persentase Jumlah penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- Tabel 9. Data jumlah petikan atau amar perkara Pidana tahun 2025
- Tabel 10. Data jumlah petikan atau amar perkara Perdata tahun 2025
- Tabel 11. Persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Tabel 12. Data jumlah pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, PK tahun 2025
- Tabel 13. Data jumlah putusan pengadilan yang diunggah di direktori putusan Tahun 2025
- Tabel 14. Perkara BHT yang di tindaklanjuti Untuk di eksekusi
- Tabel 15. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- Tabel 16. Perkara Restoratif Justice
- Tabel 17. Pengukuran Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- Tabel 18. Mediasi tahun 2025
- Tabel 19. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Tabel 20. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2025
- Tabel 21. . Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- Tabel 22. Jumlah perkara perdata e-court Tahun 2025
- Tabel 23. Jumlah perkara pidana e-berpadu Tahun 2025



Tabel 24. Jumlah perkara yang dilimpahkan secara e-berpadu Tahun 2025

Tabel 25. Index Kepuasan Masyarakat

Tabel 26. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 27. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan

Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Tabel 30. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tabel 31. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan selama tahun 2020-2025

Tabel 32. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Tabel 33. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Tabel 34. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran

Tabel 35. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan (NKA) selama tahun 2021-2025

Tabel 36. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Tabel 37. Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025

Tabel 39. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

Tabel 40. Perbandingan anggaran DIPA 01 tahun 2023-2025

Tabel 41. Realisasi anggaran DIPA 03 per jenis belanja

Tabel 42. Perbandingan anggaran DIPA 03 tahun 2023-2025

Tabel 43. Dukungan Anggaran terhadap Kinerja

Tabel 44. Laporan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim Periode Januari 2025 s.d Desember 2025

Tabel 45. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2019-2025
- Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Tahun 2019-2025
- Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2025
- Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2025
- Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5 Tahun 2025
- Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6 Tahun 2019-2025
- Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7 Tahun 2019-2025
- Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 8 Tahun 2019-2025
- Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 9 Tahun 2019-2025
- Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 10 Tahun 2025
- Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 11 Tahun 2025
- Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 12 Tahun 2025
- Grafik 13. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2013-2025
- Grafik 14. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2025



Grafik 15. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3
Indikator 2 Tahun 2020-2025

Grafik 16. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3
Indikator 3 Tahun 2021-2025

Grafik 17. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3
Indikator 4 Tahun 2025

Grafik 18. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

Grafik 19. Realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2023-2025

Grafik 20 Realisasi anggaran DIPA 03 per jenis belanja

Grafik 21. Realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2023-2025

BAB I PENDAHULUAN

A

Latar belakang

B

Tugas Pokok dan Fungsi

C

Struktur Organisasi

D

Isu-isu Strategis

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI PascaAmandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).



2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

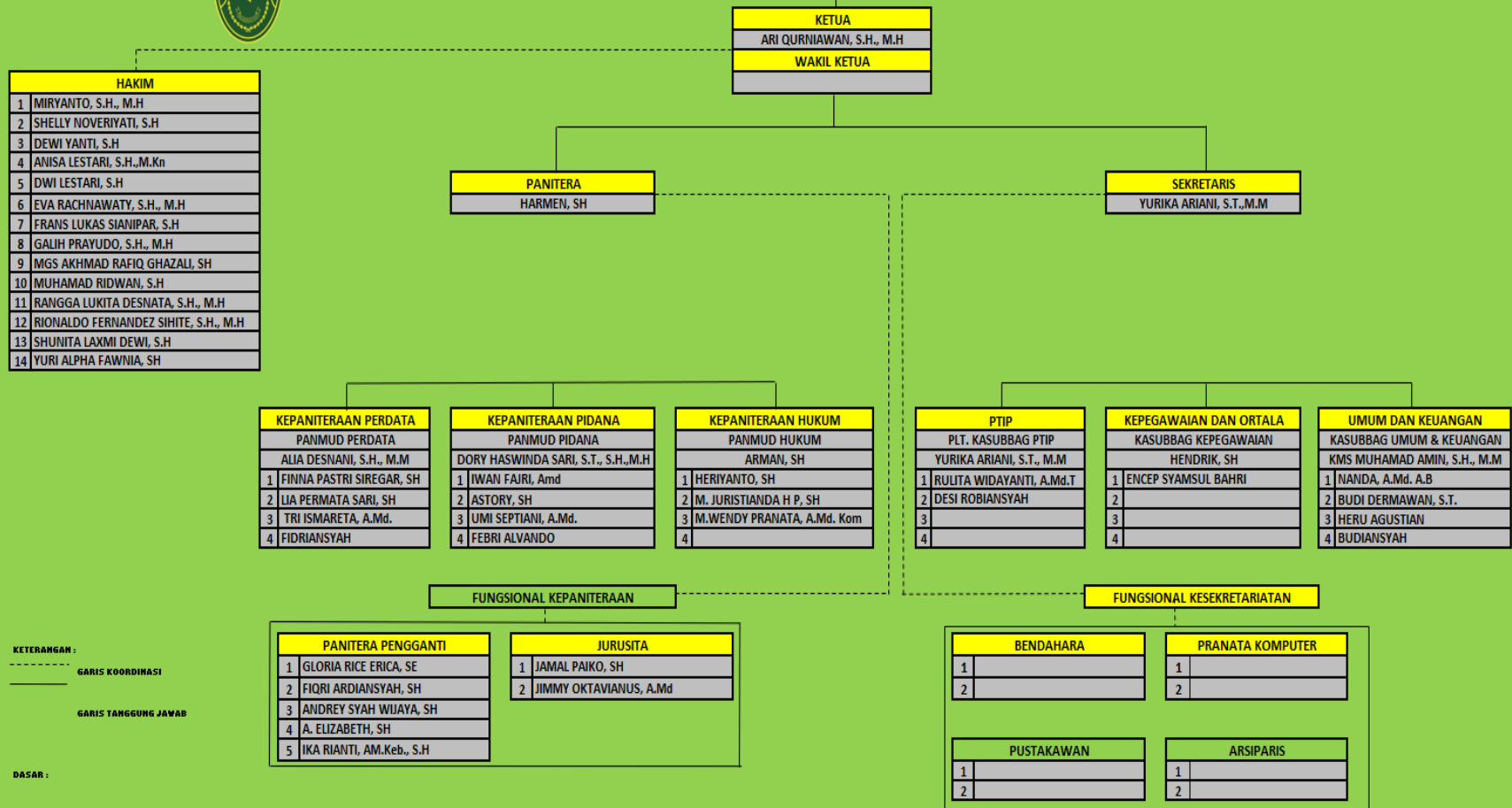
1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM





D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berikut hal-hal yang menjadi isu strategis pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Selain itu, dilakukan pelaksanaan Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Dengan penyelesaian perkara tepat waktu, keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan

2. Berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan Publik.

Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat



yang satu ke lainnya. Dengan berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, diharapkan dapat mempermudah proses dan memangkas birokrasi sehingga kepuasan masyarakat pencari keadilan lebih terpenuhi

3. Penguatan akses peradilan untuk masyarakat kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM)

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan

4. Pelaksanaan SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat yaitu dengan pertukaran informasi secara elektronik. Pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2025 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2024 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2025
5. Rencana Kinerja Tahun 2024 dan 2025
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A

Rencana Strategis 2025-2029

B

Indikator Kinerja Utama

C

Perjanjian Kinerja 2025
(Sebelum Revisi Renstra)

D

Perubahan Perjanjian Kinerja
2025 (Setelah revisi Renstra)

E

Rencana Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. REVISI RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dilakukan revisi (perubahan) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1523/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029. Dimana untuk Penyusunan Renstra satuan kerja tahun 2025-2029 berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.



MATRIKS KINERJA REVISI RENSTRA 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85	90	90	90	90	90						
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	80	80	80	80	80						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50	50						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	8	10	10	10	10						

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025



1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2	2	5	5	5	5							
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10	10	25	25	25	25							
1.10 Persentase Perkara Perdata, yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100							
1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100							
1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100							
02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	90	90	90	90	90							
03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							5,323,052,000	7,123,000,000	7,125,000.000	7,220.000.000	7,230.000,000	7,230.000,000	Kesekretariatan
3.1 Indeks Profesionalitas ASN	75	71	71	71	71	71							
1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90	90							
1.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	70	70	70	70	70							
3.3 Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3	3							



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Presentase Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia Atau Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Perkara Yang Di Putus
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Presentase Pemberitahuan Petikan Amar Putusan Tingkat Banding,Kasasi,PK yg Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Petikan Atau Amr Putusan Banding , Kasasi,PK yang Diterima Pengadilan Pengaju
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Presentase Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju
		5.Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Presentase Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan engan Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi

		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Presentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putuan Perdata Yang Diselesaikan Dengan Jumlah Putusam Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Dengan Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Presentase Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi Dengan Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Presentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Dengan Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Presentase Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektornik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Presentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Layanan Pengadilan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	Peraturan Badan Kepegawaian Daerah No 8 ahun 2019

dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Merupakan Pengukuran Tahun Berjalan
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 Tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM REVISI RENSTRA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Muara Enim , sebelum adanya revisi Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi Renstra)

Nomor : 1/KPN.W6-U6/RA1.10/I/2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		UTAMA	(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	50
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	50
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		2. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	50

Adapun capaian kinerja untuk perjanjian kinerja tersebut dari Januari sampai dengan September 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	89,01	98,9
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	50	9,65	19,3
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	97,35	108,17
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	99,17	110,19
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50	0	0
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,95	109,94
Rata-rata capaian Strategis I					78,07

Penjelasan capaian kinerja untuk masing-masing indikator (JANUARI - SEPTEMBER 2025) adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Perdata	91	81

2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Pidana	588	588

3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice
114	11

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus (Jan-Sept)	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	91	12	576
Perkara Pidana	588	6	85
JUMLAH	679	18	661

5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	91	4	584
Perkara Pidana	588	2	89
JUMLAH	679	6	673

6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi (Jan-Sept)	Perkara anak yang berhasil Diversi	Tanggal Kesepakatan Diversi	Hakim Fasilitator Diversi
6	-	-	-

7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 1-4)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Maret 2025	104 Orang	3,99	Sangat Baik
April – Juni 2025	98 Orang	3,98	Sangat Baik
Juli – September 2025	143 Orang	3,96	Sangat Baik

SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					66,67

Penjelasan capaian kinerja untuk masing-masing indikator (JANUARI - SEPTEMBER 2025) adalah sebagai berikut :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu

PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
Gugatan	32	32
Gugatan Sederhana	25	25
Permohonan	34	34
Jumlah	91	91

2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
Pidana Biasa	553	553
Pidana Anak	35	35
Jumlah	588	588

3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jenis Perkara Perdata (Jan-Sept)	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Gugatan	29	0	29

SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III					100

Penjelasan capaian kinerja untuk masing-masing indicator (JANUARI - SEPTEMBER 2025) adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara yang diajukan prodeo	Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo
1 perkara	1 perkara

2. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
117	117

SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	50	50	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV					100

Penjelasan capaian kinerja untuk masing-masing indicator (JANUARI - SEPTEMBER 2025) adalah sebagai berikut :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)

No	TAHUN	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Proses (tindak lanjut)
1.	Jan-Sept 2025	3/Pdt.Eks/2025/PN Mre jo 15/Pdt.G/2023/PN Mre	22 Jul 2025	Pelaksanaan Eksekusi dengan tanggal sita eksekusi 28 Aug 2025
2.		2/Pdt.Eks/2025/PN Mre jo 23/Pdt.G/2007/PN.ME	24 Mar 2025	Pelaksanaan Peneguran (Aanmaning)

D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (SETELAH REVISI RENSTRA)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%

		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.854.323.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 323.391.000,-

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Adapun rencana kinerja tahun 2025 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A

Capaian Kinerja Organisasi

B

Realisasi Anggaran

C

Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja

D

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2025 yaitu : sebesar 113,50% untuk sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern”. Sebesar 110,5% untuk sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, dan sebesar 115,34% untuk sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.”

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %	98,6 %	109,4 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	86,21%	107,76%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	66,67%	133,34 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8,38 %	104, 75 %

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2&	3,23%	161,5%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi	10%	25%	250 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis I					113,50
3.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,98	110,5
Rata-rata capaian Sasaran Strategis II					110,5
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71	79,52	112
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90	98,55	109,5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	92,5	132,14
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,23	107,7
Rata-rata capaian Sasaran Strategis III					115,34

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN UNIT KERJA SEJENIS

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dapat dilihat dari data sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2025

Satuan Kerja			Pengadilan Negeri Palembang	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Pengadilan Negeri Sekayu	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Pengadilan Negeri Muara Enim	Pengadilan Negeri Baturaja	Pengadilan Negeri Lahat	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pengadilan Negeri Prabumulih	Pengadilan Negeri Pagar Alam	Rerata
KATEGORI PENGADILAN			Jumlah Perkara	> 2000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	1-500 Perkara	1-500 Perkara	
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Target	85,00%	99,00%	95,00%	90,00%	90,00%	100,00%	97,50%	97,00%	90,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	97,91%	100,00%	97,20%	98,50%	100,00%	99,69%	96,00%	99,62%	100,00%	
		Capaian	117,65%	98,90%	105,26%	108,00%	109,44%	100,00%	102,25%	98,97%	110,69%	100,00%	105,12%
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	97,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	97,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,20%	100,00%	100,00%	99,89%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Target	90,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	111,11%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,06%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Target	85,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	117,65%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,20%	100,00%	100,00%	101,89%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Target	80,00%	99,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	125,00%	101,01%	100,00%	100,00%	107,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	103,38%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Target	60,00%	91,00%	100,00%	30,00%	50,00%	15,00%	50,00%	60,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	58,65%	NA	100,00%	166,67%	66,67%	3,42%	66,66%	60,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	97,75%	NA	100,00%	555,57%	133,34%	22,80%	133,32%	100,00%	100,00%	100,00%	149,20%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target	5,00%	9,00%	53,00%	90,00%	8%	3,00%	100,00%	13,00%	85,00%	3,00%	
		Realisasi	0,00%	1,61%	56,60%	100,00%	8,38%	100,00%	100,00%	13,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	0,00%	17,89%	106,79%	111,11%	104,75%	333,33%	100,00%	100,00%	117,65%	333,33%	732,49%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	5,00%	19,00%	4,20%	5,00%	2,00%	5,00%	50,00%	12,00%	10,00%	5,00%	
		Realisasi	3,04%	20,45%	4,54%	12,90%	3,23%	17,14%	50,00%	13,00%	11,00%	70,00%	
		Capaian	60,80%	107,63%	108,10%	258,00%	161,50%	342,80%	100,00%	108,33%	110,00%	1400,00%	275,72%

LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Target	5,00%	99,00%	20,00%	90,00%	10,00%	5,00%	1,00%	2,00%	90,00%	5,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	2000,00%	101,01%	0,00%	0,00%	250,00%	2000,00%	0,00%	0,00%	111,11%	2000,00%	646,21%
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Target	80,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	125,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,60%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,10%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	Target	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Capaian	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,10%
Capaian per Sasaran			254,58%	93,86%	93,35%	144,19%	122,23%	541,45%	94,63%	92,31%	104,12%	636,11%	217,68%
Sasaran Strategis II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Target	3,80	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	4,00	3,80	3,00	
		Realisasi	3,98	3,99	3,99	4,00	3,98	3,98	3,89	4,00	4,00	3,91	
		Capaian	104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	106,80%
	Capaian per Sasaran		104,74%	105,00%	105,00%	100,00%	110,56%	104,74%	102,37%	100,00%	105,26%	130,33%	106,80%
Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Target	80,00	75,00	78,00	80,00	71,00	71,00	70,00	92,00	78,00	80,00	
		Realisasi	59,58	79,83	81,67	79,44	79,52	82,75	92,50	90,00	79,53	82,25	
		Capaian	74,48%	106,44%	104,71%	99,30%	112,00%	116,55%	132,14%	97,83%	101,96%	102,81%	104,82%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Target	90,00	93,00	92,00	90,00	90,00	95,00	82,00	88,00	92,00	90,00	
		Realisasi	93,88	97,98	98,16	93,30	98,67	95,79	86,90	97,00	98,71	99,03	
		Capaian	104,31%	105,35%	106,70%	103,67%	109,63%	100,83%	105,98%	110,23%	107,29%	110,03%	106,40%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Target	90,00	93,00	92,00	90,00	90,00	95,00	82,00	88,00	92,00	85,00	
		Realisasi	74,400	91,60	98,97	90,92	98,53	91,46	89,20	93,00	92,29	100,00	
		Capaian	82,67%	98,49%	107,58%	101,02%	109,48%	96,27%	108,78%	105,68%	100,32%	117,65%	102,79%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Target	80,00	99,00	75,00	83,00	70,00	80,00	70,00	86,00	90,00	80,00	
		Realisasi	98,88	100,00	81,25	86,21	100,00	100,00	56,25	100,00	100,00	100,00	
		Capaian	123,60%	101,01%	108,33%	103,87%	142,86%	125,00%	80,36%	116,28%	111,11%	125,00%	113,74%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Target	80,00	95,00	75,00	83,00	70,00	80,00	70,00	86,00	90,00	80,00	
		Realisasi	100,00	85,00	75,63	79,90	85,00	83,80	83,05	85,00	85,00	85,00	
		Capaian	125,00%	89,47%	100,84%	96,27%	121,43%	104,75%	118,64%	98,84%	94,44%	106,25%	105,59%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target	3,00	3,80	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,30	3,00	
		Realisasi	2,80	3,32	3,30	3,30	3,23	3,00	3,25	4,00	3,30	2,75	
		Capaian	93,33%	87,37%	110,00%	82,50%	107,67%	75,00%	81,25%	100,00%	100,00%	91,67%	92,88%
Capaian per Sasaran			100,56%	98,02%	106,36%	97,77%	117,18%	103,07%	104,52%	104,81%	102,52%	108,90%	104,37%

A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN.

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 12 (dua belas) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara yang diselesaikan/ putus	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	2025	930	916	98,5	90	109,4
	2024	1005	1000	99,50	95	104,74
	2023	939	939	100	95	105,26
	2022	780	775	99,36	100	99,36
	2021	835	835	100	100	100
	2020	709	692	97,60	100	97,60
	2019	834	833	99,88	100	99,88

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2025. Jumlah perkara yang putus sebanyak 112 perkara, dan perkara yang putus tepat waktu adalah sebanyak 98 perkara.

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2025

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Gugatan	4	1
	Gugatan Sederhana	11	11
	Permohonan	1	1
TOTAL		16	13
Februari	Gugatan	4	2
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	1	1
TOTAL		6	4
Maret	Gugatan	4	1
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	2	2
TOTAL		7	4
April	Gugatan	1	0
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	1	1
TOTAL		2	1
Mei	Gugatan	4	4
	Gugatan Sederhana	2	2
	Permohonan	2	2
TOTAL		8	8
Juni	Gugatan	2	3
	Gugatan Sederhana	3	3
	Permohonan	8	8
TOTAL		14	14
Juli	Gugatan	8	8
	Gugatan Sederhana	5	5

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

	Permohonan	8	8
TOTAL		21	21
Agustus	Gugatan	3	2
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	8	8
TOTAL		12	11
September	Gugatan	1	1
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	3	3
TOTAL		5	5
Oktober	Gugatan	4	4
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	5	5
TOTAL		10	10
November	Gugatan	6	2
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	4	4
TOTAL		10	6
Desember	Gugatan	1	1
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	0	0
TOTAL		1	1
TOTAL SELURUH PERKARA		112	98

Penyelesaian Perkara Pidana

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2025

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Pidana Biasa	48	48
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		51	51
Februari	Pidana biasa	76	76
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		78	78
Maret	Pidana Biasa	53	53
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		57	57
April	Pidana biasa	63	63
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		64	64
Mei	Pidana Biasa	50	50
	Pidana Anak	12	12
TOTAL		62	62
Juni	Pidana biasa	29	29

	Pidana Anak	4	4
TOTAL		33	33
Juli	Pidana Biasa	147	147
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		149	149
Agustus	Pidana biasa	19	19
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		23	23
September	Pidana Biasa	68	68
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		71	71
Oktober	Pidana biasa	94	94
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		95	95
November	Pidana Biasa	48	48
	Pidana Anak	0	0
TOTAL		48	48
Desember	Pidana biasa	85	85
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		87	87
TOTAL SELURUH PERKARA		818	818

Tabel 3. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2025

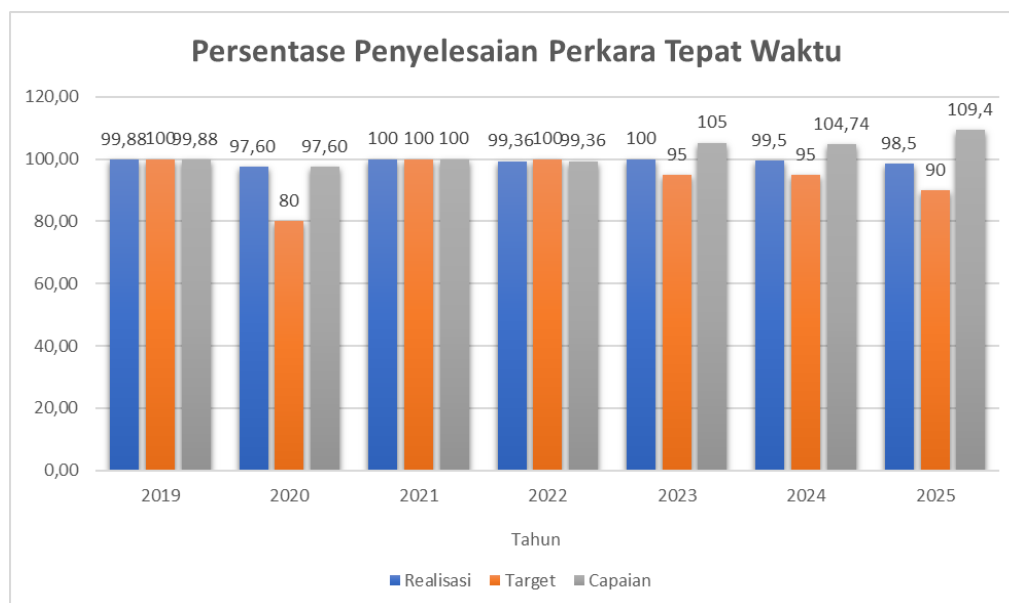
PERKARA	JENIS PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Pidana	Pidana Biasa	780	780	780
	Pidana Anak	38	38	38
Perdata	Gugatan	43	29	29
	Gugatan Sederhana	26	26	26
	Permohonan	43	43	43
Total		930	916	916

Selama tahun 2025 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 112 perkara, perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 818 perkara. Untuk perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) perkara perdata sebanyak 98 perkara, dan perkara pidana sebanyak 818 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98,5 % dan capaian 109,4 %

Tabel 4. Pengukuran Perkara yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	2025	930	916	98,5	90	109,4
	2024	1005	1000	99,50	95	104,74
	2023	939	939	100	95	105,26
	2022	780	775	99,36	100	99,36
	2021	835	835	100	100	100
	2020	709	692	97,60	100	97,60
	2019	834	833	99,88	100	99,88

Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 1 Tahun 2019-2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 98,5%, turun 1% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Capaian pada tahun 2025 sebesar 109,4 %, naik 4,66 % dari tahun 2024, dengan perubahan target dari 95% di tahun 2025 menjadi sebesar 90% pada tahun 2025
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 7 tahun (2019-2025), adalah 99,88%, 97,60%, 100%, 99,36%, 105,26%, 104,74 %, 109,4%. Artinya capaian selama kurun waktu tersebut dapat dipertahankan dan semakin baik.

- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 98,5%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP), rapat tim satgas SIPP, monitoring dan evaluasi SIPP setiap hari.
2. Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang di Kepaniteraan
3. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
5. Kepatuhan terhadap court calendar (kalender sidang/agenda persidangan), untuk menaati jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu perkara.

b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Presentase Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia Atau Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Perkara Yang Di Putus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2025	818	818	100	100	100
	2024	946	183	100	100	100
	2023	939	117	100	100	100
	2022	888	135	100	100	100
	2021	946	142	100	100	100
	2020	774	98	100	100	100
	2019	619	619	100	100	100

Tabel 5. Jumlah perkara yang putus dan Salinan putusan yang dikirimkan Kepada para pihak pada tahun 2025

PERKARA	JENIS PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
Pidana	Pidana Biasa	780	780
	Pidana Anak	38	38
Perdata	Gugatan	43	43
	Gugatan Sederhana	26	26
	Permohonan	43	43
Total		930	930

Tabel 6. Jumlah putusan dan Salinan putusan perdata yang dikirim para pihak selama Tahun 2020-2025

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2020	98	98
	2021	142	142
	2022	135	135
	2023	117	117
	2024	183	183
	2025	112	112

Tabel 7. Jumlah putusan dan Salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak Selama tahun 2020-2025

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2020	676	676
	2021	804	804
	2022	753	753
	2023	822	822
	2024	763	763
	2025	818	818

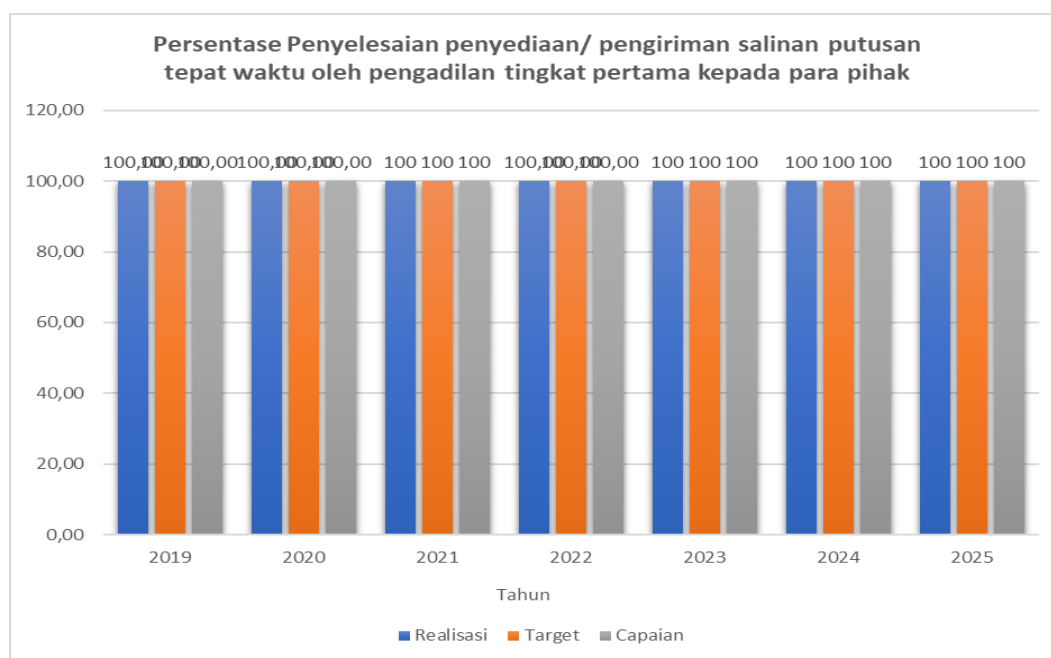
Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2025 sebanyak 930 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 930 putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Tabel 8. Persentase Jumlah penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2025	818	818	100	100	100
	2024	946	183	100	100	100
	2023	939	117	100	100	100
	2022	888	135	100	100	100
	2021	946	142	100	100	100
	2020	774	98	100	100	100
	2019	619	619	100	100	100

**Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 2 Tahun 2019-2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 100%, sama dengan tahun 2024. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

- Dalam kurun waktu selama 7 tahun (2019-2025) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa Salinan putusan perkara perdata yang putus ditahun 2025 telah diterima para pihak tepat waktu dan selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 7 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan.
- Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Presentase Pemberitahuan Petikan Amar Putusan Tingkat Banding,Kasasi,PK yg Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding , Kasasi,PK yang Diterima Pengadilan Pengaju, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah Pemberitahuan Petikan Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yg Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{jumlah Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, PK yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9. Data jumlah petikan atau amar perkara Pidana tahun 2025

BULAN	Jumlah petikan atau amar putusan yang diterima			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan kepada para pihak tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Jan	1	0	0	1	0	0
Feb	1	0	1	1	0	1
Mar	0	0	0	0	0	0
April	1	2	0	1	2	0
Mei	1	0	0	1	0	0
Juni	2	0	0	2	0	0
Juli	1	0	0	1	0	0
Agustus	0	1	0	0	1	0
Sept	4	1	0	4	1	0
Okt	2	0	0	2	0	0
Nov	4	0	0	4	0	0
Des	2	1	0	2	1	0
Total	19	5	1	19	5	1

Tabel 10. Data jumlah petikan atau amar perkara Perdata tahun 2025

BULAN	Jumlah petikan atau amar putusan yang diterima			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan kepada para pihak tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Jan	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0
Mar	0	0	0	0	0	0
April	1	0	1	1	0	1
Mei	1	2	0	1	2	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	1	0	0	1	0	0
Agustus	0	1	0	0	1	0
Sept	3	0	0	3	0	0
Okt	0	0	0	0	0	0
Nov	0	1	0	0	1	0
Des	3	0	1	3	0	1
Total	6	4	2	6	4	2

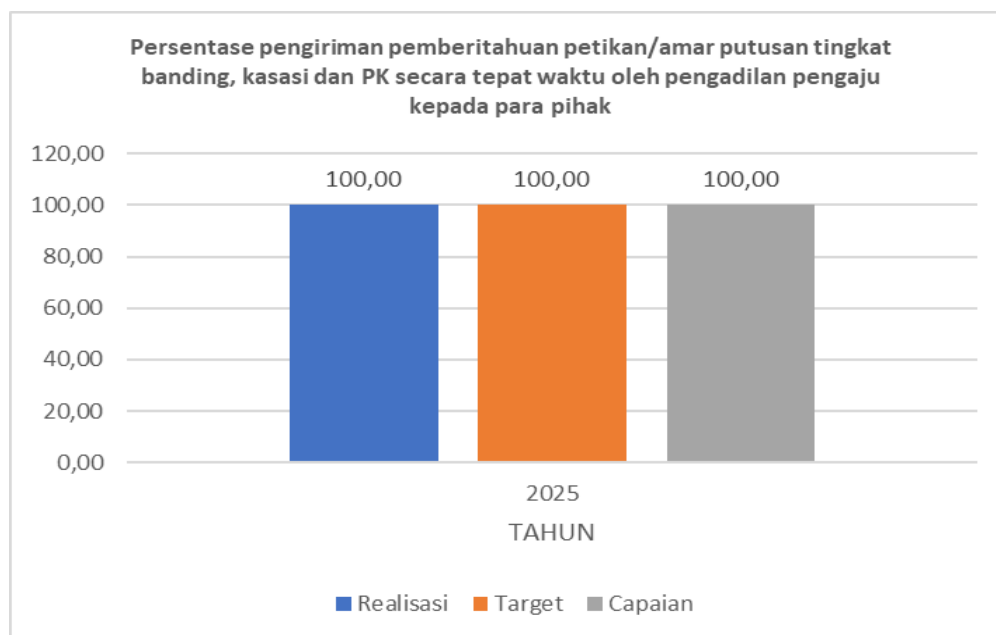
Tabel 11. Persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

PERKARA	Jumlah petikan atau amar putusan yang diterima			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan kepada para pihak tepat waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana	19	5	1	19	5	1
Perdata	6	4	2	6	4	2
Total	25	9	3	25	9	3

Jumlah petikan atau amar putusan yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37 amar putusan, dan pemberitahuan petikan atau amar putusan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 37 amar putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara

Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

- Pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan amar putusan kepada para pihak sejak putusan diterima
- Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua/Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Presentase Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

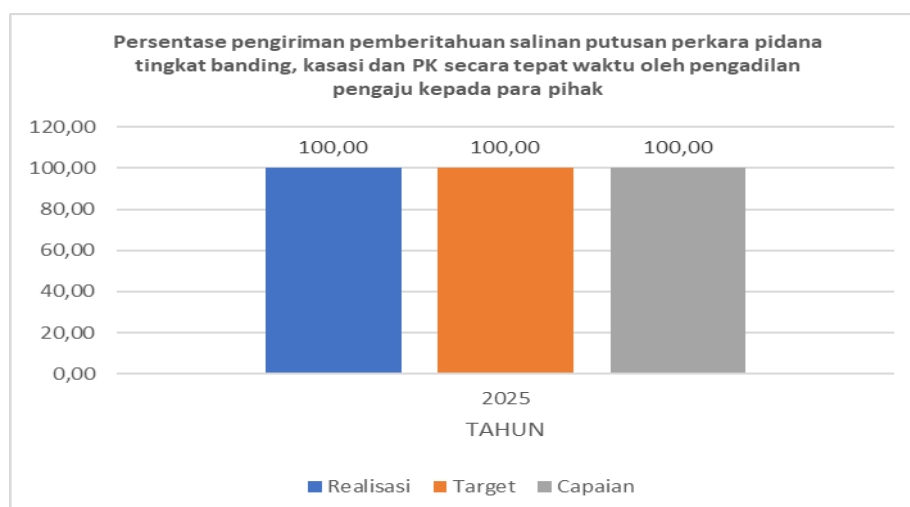
Tabel 12. Data jumlah pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi, PK tahun 2025

BULAN	Jumlah Salinan Putusan pidana Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima			Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Jan	1	0	0	1	0	0
Feb	1	0	1	1	0	1
Mar	0	0	0	0	0	0
April	1	2	0	1	2	0
Mei	1	0	0	1	0	0
Juni	2	0	0	2	0	0
Juli	1	0	0	1	0	0
Agustus	0	1	0	0	1	0
Sept	4	1	0	4	1	0
Okt	2	0	0	2	0	0
Nov	4	0	0	4	0	0
Des	2	1	0	2	1	0
Total	19	5	1	19	5	1
Jumlah yang diterima			25	Jumlah yang dikirim		25

Jumlah Salinan Putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima pada tahun 2025 sebanyak 25 salinan putusan, dan pemberitahuan salinan putusan Banding, Kasasi Dan PK kepada para pihak tepat waktu sebanyak 25 salinan putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak sejak putusan diterima
- Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua/Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan

e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Putusan yang diunggah di direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah di minutasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Presentase Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

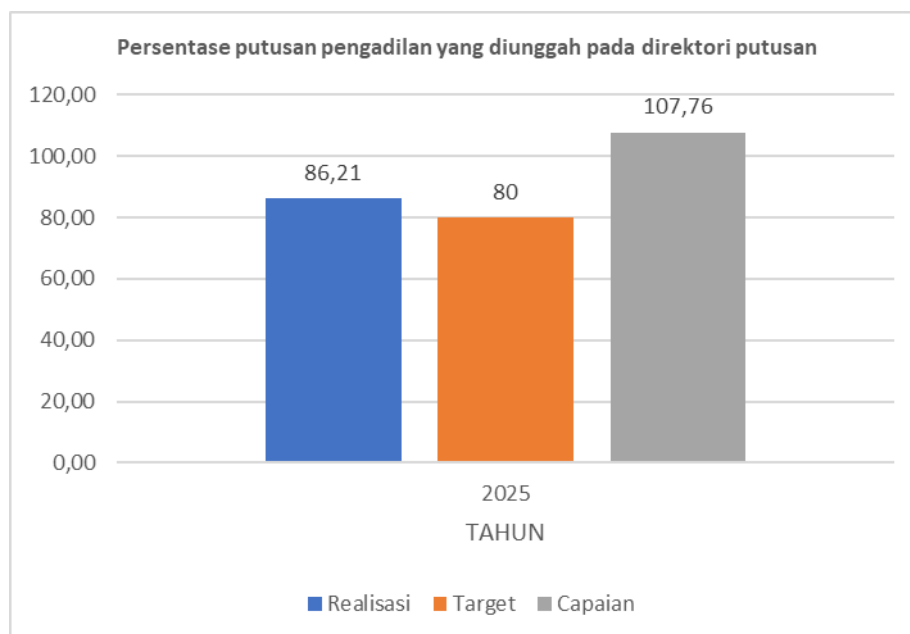
Tabel 13. Data jumlah putusan pengadilan yang diunggah di direktori putusan Tahun 2025

Jumlah Putusan yang telah di minutasasi	Jumlah putusan yang di unggah di Direktori Putusan
928	800

Jumlah Jumlah putusan yang telah diminutasasi pada tahun 2025 sebanyak 928 putusan, dan Jumlah putusan yang di unggah di Direktori Putusan sebanyak 800 putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 adalah sebesar 86,21%, dan capaiannya sebesar 107,76%.

Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5 Tahun 2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 sebesar 86,21%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

- Pada tahun 2025 capaian sebesar 107,76% jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara yang sudah putus dan minutasikan dan diupload ke direktori putusan secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi SIPP.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh satgas SIPP, MIS dan EIS setiap hari.

f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putuan Perdata Yang Diselesaikan Dengan Jumlah Putusam Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi”, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putuan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusam Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 50 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 14 Perkara BHT yang di tindaklanjuti
Untuk di eksekusi**

No	TAHUN	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Proses (tindak lanjut)
1	2025	4/Pdt.Eks/2025/PN Mre jo 33/Pdt.G/2023/PN Mre	01 Oct 2025	Pelaksanaan Eksekusi dengan tanggal sita eksekusi 04 Nov 2025
2.		3/Pdt.Eks/2025/PN Mre jo 15/Pdt.G/2023/PN Mre	22 Jul 2025	Pelaksanaan Eksekusi dengan tanggal sita eksekusi 28 Aug 2025
3		2/Pdt.Eks/2025/PN Mre jo 23/Pdt.G/2007/PN.ME	24 Mar 2025	Pelaksanaan Peneguran (Aanmaning)

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:

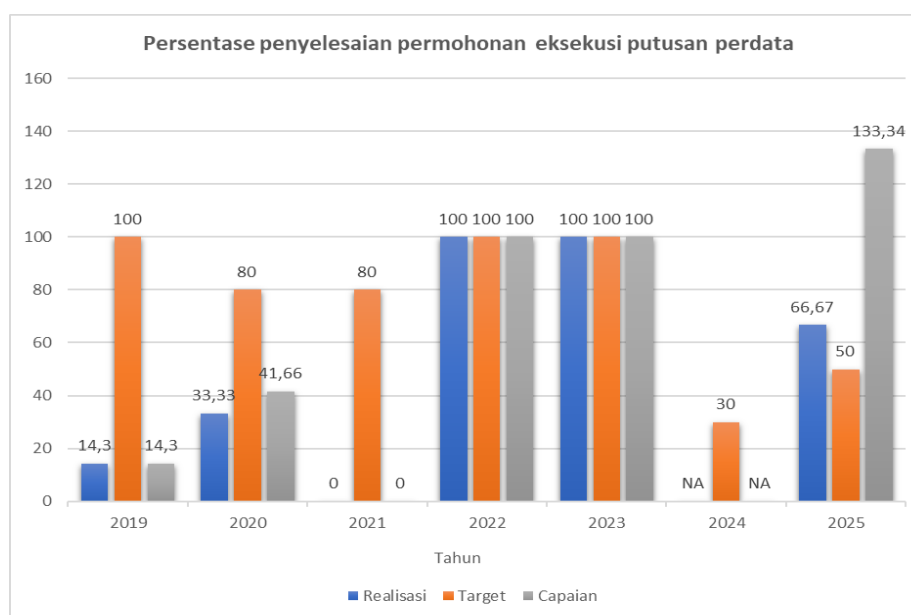
- Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- Dicabut; dan
- Dicoret dari register termasuk non executable

Pada tahun 2025, Jumlah permohonan eksekusi sebanyak 3 perkara, dan yang berhasil dilaksanakan eksekusi sebanyak 2 perkara. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 66,67%, dan capaian 133,34%.

Tabel 15. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2025	3	2	66,67	50	133,34
	2024	NA	NA	NA	30	NA
	2023	4	4	100	100	100
	2022	1	1	100	100	100
	2021	2	0	0	80	0
	2020	3	1	33,33	80	41,66
	2019	7	1	14,3	100	14,3

**Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4
Indikator 6 Tahun 2019-2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah 66,67 % dengan capaian sebesar 133,34%.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 7 tahun (2019-2025), adalah 14,30%, 41,66%, 0%, 100%, 100%, NA , 133,34%. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, Perkara yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti, hampir dapat dilaksanakan seluruhnya. Yang berarti bahwa meningkatnya kepatuhan para pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 133,34% jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebesar 50%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah :

- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata secara rutin dan berkala.
- Adanya aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) yang berfungsi sebagai sarana pemantauan proses eksekusi di seluruh pengadilan Indonesia secara lebih transparan dan akuntabel.

g. Indikator Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif”, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 8 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 16. Perkara Restoratif Justice

Bulan	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice
Januari	11	0
Februari	11	1
Maret	12	3
April	8	1
Mei	23	0
Juni	14	0
Juli	10	3
Agustus	7	1
September	18	2
Oktober	19	1
November	20	2
Desember	14	0
TOTAL	167	14

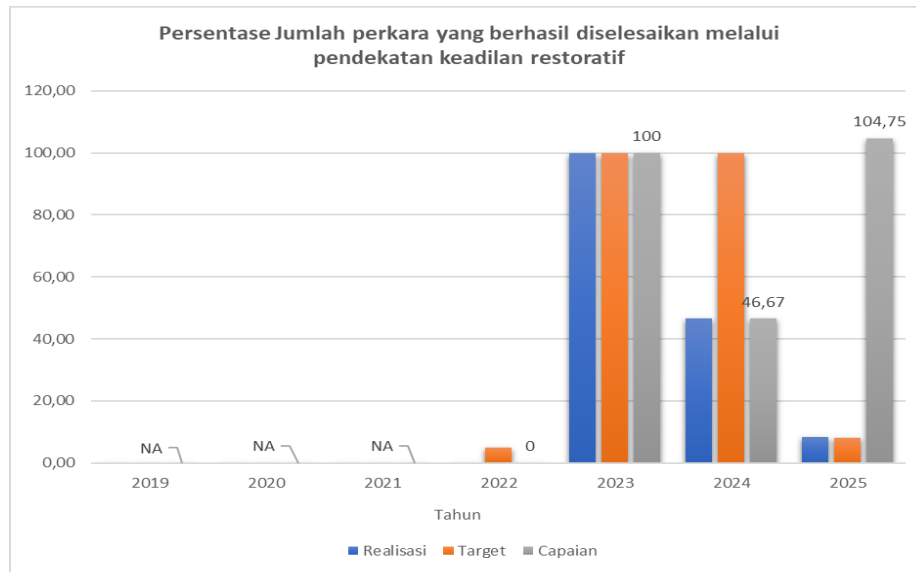
Jumlah Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 167 perkara, dan perkara yang berhasil Restoratif Justice pada tahun 2025 sebanyak 14 perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. pada tahun 2025 adalah sebesar 8,38%, dan capaiannya sebesar 104,75%.

Tabel 17. Pengukuran Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	2025	167	14	8,38	8	104,75
	2024	15	7	46,67	100	46,67
	2023	2	2	100	100	100
	2022	0	0	0	5	0
	2021	NA	NA	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA	NA	NA
	2019	NA	NA	NA	NA	NA

Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 7 Tahun 2019-2025



Dari table “dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 sebesar 8,38%, menurun 38,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Capaian pada tahun 2025 sebesar 104,75 %, naik 58,08 % dari tahun 2025. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah perkara yang Memenuhi Kriteria untuk diselesaikan dengan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, dan adanya penurunan target kinerja pada tahun 2025
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah NA, NA, NA, 0% , 100 % dan 46,67 %, 104,75%. Pada tahun 2019-2021 data target dan realisasi tidak dapat disajikan karena Indikator Realisasi kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif ini tidak dimuat dalam akuntabilitas kinerja tahun tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, indicator kinerja belum terdapat dalam sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 104,75%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative sebesar 10%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab berhasilnya perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif justice adalah :

1. Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP)
3. Menempel stiker khusus pada berkas untuk perkara yang dapat diajukan restorative Justice dan membuat buku register perkara Restorative Justice, untuk memantau keberhasilan penyelesaian perkara

h. Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Dengan Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 2 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut:

Tabel 18. Mediasi tahun 2025

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	31	1	30

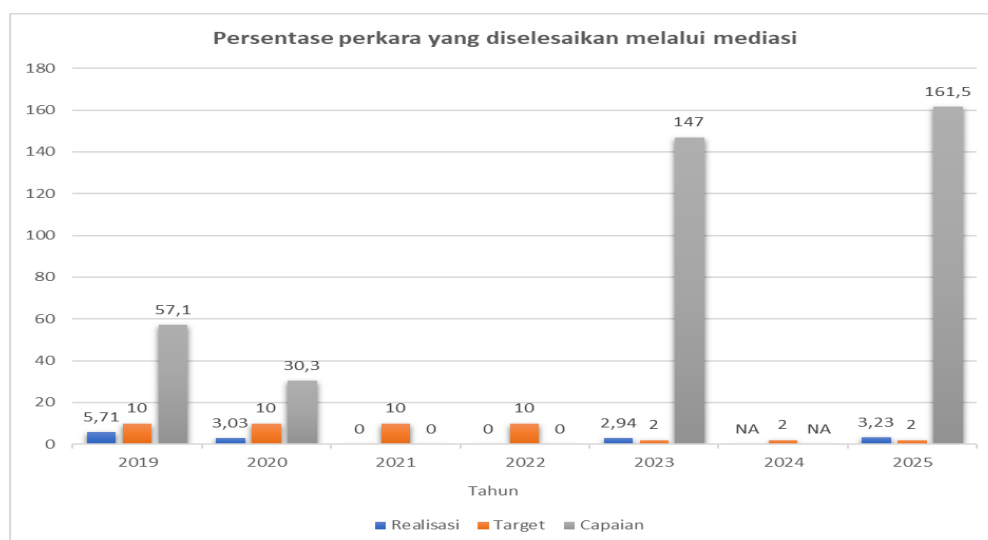
Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 31 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 1 perkara (28/Pdt.G/2025/PN Mre), dengan mediator Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim : Muhammad Ridwan, SH

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 adalah sebesar 3,23%, dan capaiannya sebesar 161,5%.

Tabel 19. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2025	3,23	2	161,5
	2024	0	2	0
	2023	2,94	2	147
	2022	0	10	0
	2021	0	10	0
	2020	3,03	10	30,3
	2019	5,71	10	57,1

Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 8 Tahun 2019-2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 sebesar 3,23%, naik 3,23 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 sebesar 161,5 %, naik 161,5 % dari tahun 2025, dengan target 2 % pada 3 tahun terakhir.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 7 tahun (2019-2025), adalah 57,10%, 30,30%, 10%, 0%, 147%, 0 %, dan 161,5%

Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, Hal ini dikarenakan:

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak.
 2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,23%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 2%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab berhasilnya Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2025 adalah :

- Adanya upaya dari Mediator hakim untuk mendorong perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

i. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Presentase Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi Dengan Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi,,}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 20. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2025

Perkara Anak yang masuk tahun 2025	Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi	Perkara anak yang berhasil Diversi	Tanggal Kesepakatan Diversi	Hakim Fasilitator Diversi
30	8	38/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre	23 Des 2025	Shunita Laxmi Dewi, SH
		36/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre	18 Des 2025	Dwi Lestari, SH

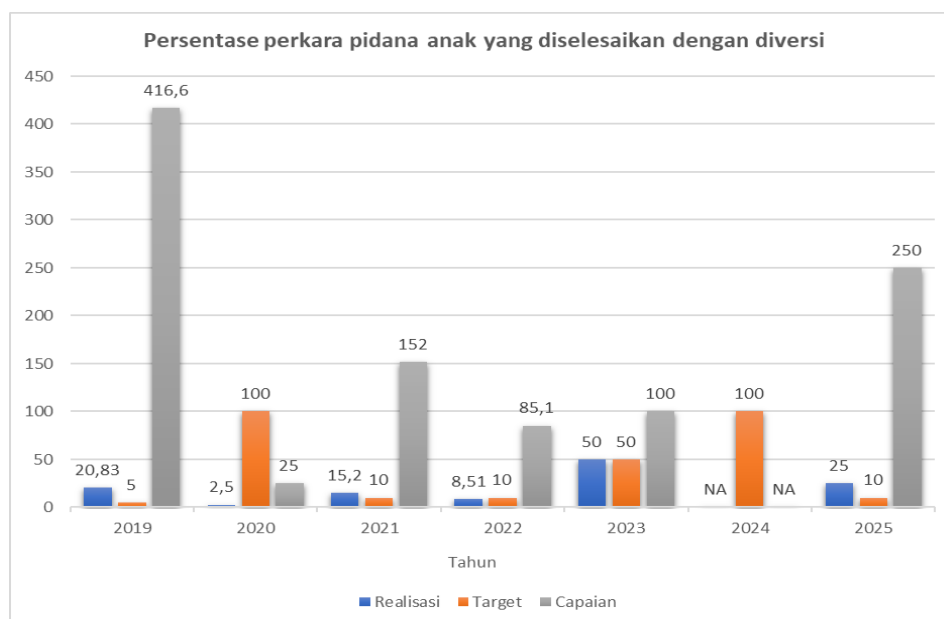
Pada tahun 2025, jumlah perkara anak yang masuk sebanyak 30 perkara. Perkara anak yang memenuhi syarat diajukan diversi sebanyak 8 perkara, dan sebanyak 2 perkara berhasil dilaksanakan diversi.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2025 adalah sebesar 25%, dan capaiannya sebesar 250%.

Tabel 21. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi	Perkara anak yang berhasil Diversi	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2025	8	2	25	10	250
	2024	NA	NA	NA	100	NA
	2023	2	1	50	50	100
	2022	47	4	8,51	10	85,1
	2021	33	4	15,2	10	152
	2020	40	1	2,5	100	25
	2019	48	10	20,83	5	416,6

**Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 9 Tahun 2019-2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2025 adalah 25%, dan capaian sebesar 250%.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 7 tahun (2019-2025), adalah 416,6%, 25%, 152%, 85,1%, 100%, NA dan 250% pada Tahun 2025. Jika dilihat dari capaian selama 7 tahun tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim selalu berusaha untuk meningkatkan keberhasilan diversi perkara anak.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 25%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 10%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa penyebab keberhasilan ercapainya target tahun 2025 adalah :

- Adanya upaya hakim untuk menerapkan penyelesaian perkara anak dengan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, peran aktif aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dalam memediasi

- Adanya itikad baik dan tanggung jawab dari pelaku anak serta dukungan dari orang tua/ keluarga

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Dengan Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E – Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

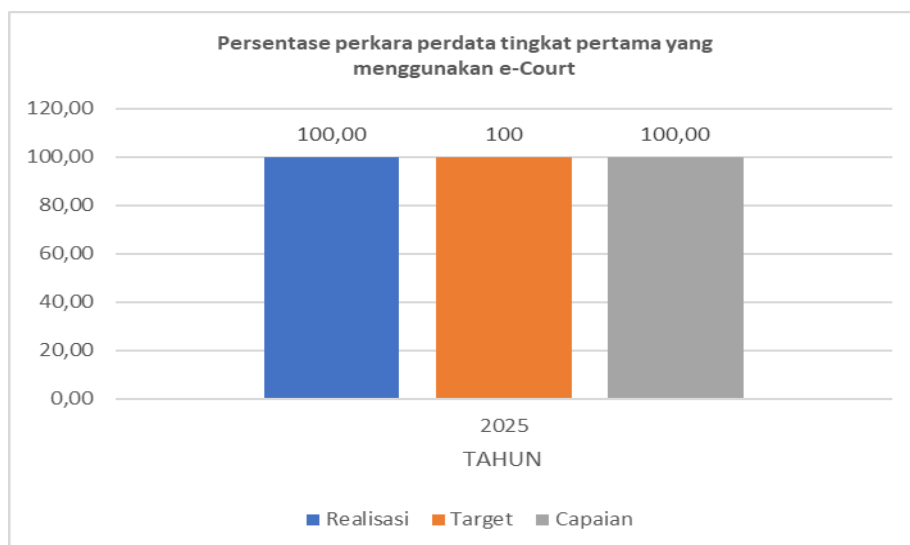
Tabel 22. Jumlah perkara perdata e-court Tahun 2025

Perkara	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan E-Court
Gugatan	31	31
Gugatan Sederhana	16	16
Permohonan	42	42
Total	89	89

Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata sebanyak 89 perkara, yang terdiri dari 31 perkara Gugatan, 16 Perkara Gugatan Sederhana dan 42 perkara Permohonan. Perkara perdata yang diajukan menggunakan ecourt sebanyak 89 perkara, artinya seluruh perkara perdata telah menggunakan aplikasi ecourt.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

**Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 10 Tahun 2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara ecourt yang masuk.
- Kemampuan dan pengetahuan Pengguna Terdaftar (advokat) atau pengguna lain dalam mengoperasikan aplikasi e-Court.

k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

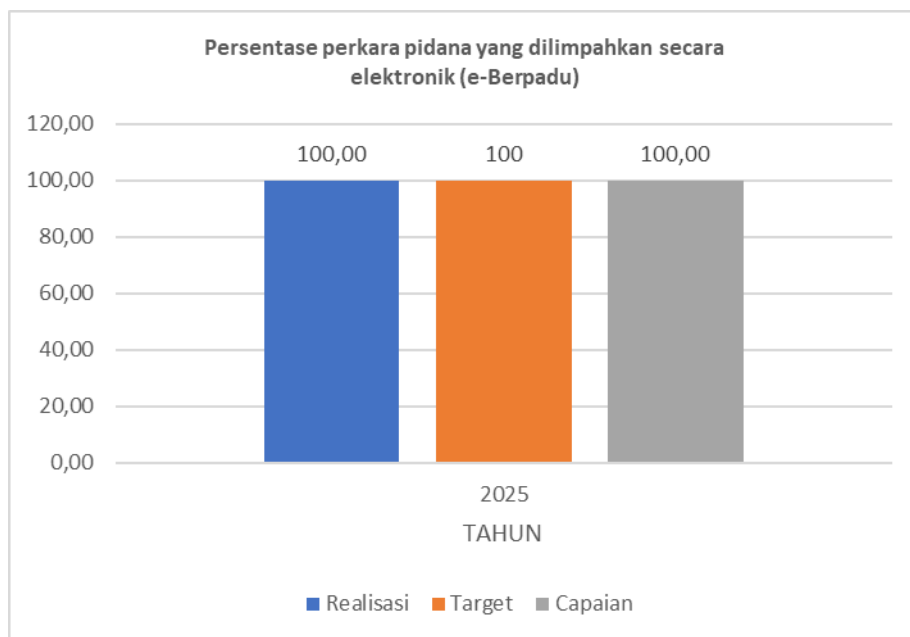
Tabel 23. Jumlah perkara pidana e-berpadu Tahun 2025

Bulan	Jenis perkara	Jumlah perkara yang dilimpahkan	Jumlah perkara yang dilimpahkan melalui eberpadu
Jan	Biasa	46	46
	Anak	4	4
Feb	Biasa	70	70
	Anak	0	0
Mar	Biasa	61	61
	Anak	5	5
Apr	Biasa	51	51
	Anak	7	7
Mei	Biasa	99	99
	Anak	8	8
Juni	Biasa	39	39
	Anak	2	2
Juli	Biasa	43	43
	Anak	3	3
Agust	Biasa	96	96
	Anak	4	4
Sept	Biasa	56	56
	Anak	1	1
Okt	Biasa	64	64
	Anak	1	1
Nov	Biasa	46	46
	Anak	0	0
Des	Biasa	76	76
	Anak	4	4
TOTAL		816	816

Pada tahun 2025, jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan sebanyak 816 perkara. Perkara pidana yang dilimpahkan menggunakan eberpadu sebanyak 816 perkara, artinya seluruh perkara pidana telah menggunakan aplikasi eberpadu (elektronik).

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

**Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 11 Tahun 2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara pidana yang masuk.
- Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (eBerpadu)

I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) ” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

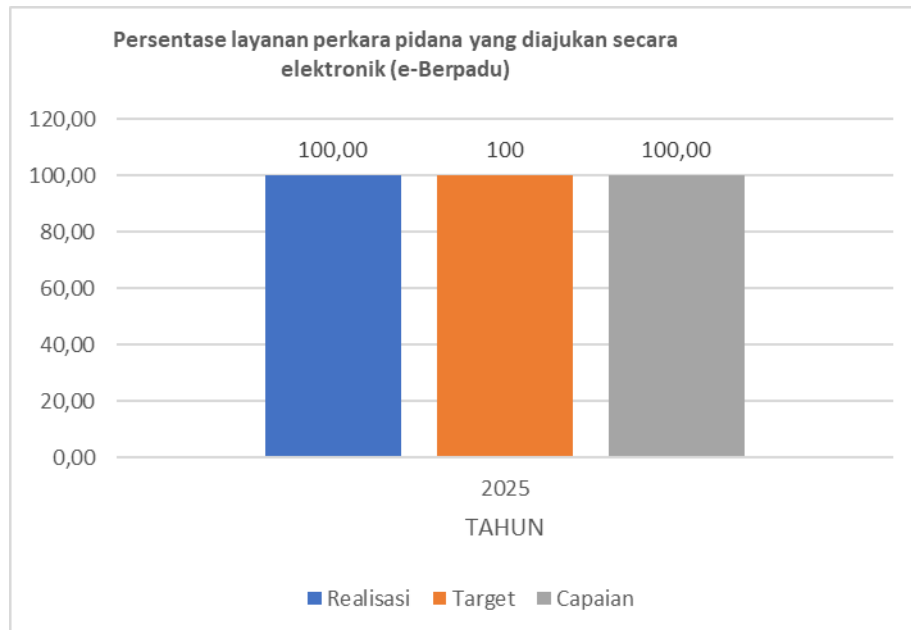
Tabel 24. Jumlah perkara yang dilimpahkan secara e-berpadu Tahun 2025

JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Pelimpahan	50	70	66	58	107	41	46	100	57	65	76	80	816
Penahanan	52	35	55	49	36	28	53	55	52	61	40	55	571
Sita	90	90	102	105	95	107	103	85	95	84	98	77	1131
Penggeledahan	25	17	36	15	27	31	29	25	28	27	31	35	326
Izin besuk	69	32	36	82	90	67	140	63	75	75	77	124	930
Pembantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversi	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
Izin Pinjam Pakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Penahanan Banding	1	1	0	5	3	5	6	5	5	4	9	13	57
Penahanan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkas Prapradilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penangguhan Penahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengalihan Penahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pindah Tempat Sidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izin Keluar Tahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL													3837

Pada tahun 2025, jumlah layana perkara Pidana yang dilimpahkan sebanyak 3837 layanan Perkara pidana, Layanan yang dilimpahkan menggunakan eberpadu sebanyak 3837 layanan, artinya seluruh layanan perkara pidana telah menggunakan aplikasi eberpadu (elektronik).

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

**Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 12 Tahun 2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%.
- Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas layanan perkara pidana yang masuk melalui eberpadu.
- Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (eberpadu).
- Sosialisasi layanan eberpadu melalui media sosial Pengadilan Negeri Muara Enim.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 3,6.

Pada tahun 2025, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2025, April sd Juni 2025, periode Juli sd September 2025 dan periode Oktober sd Desember 2025. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukansaran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 1-4)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Maret 2023	93 Orang	3,80	Sangat Baik
April – Juni 2023	367 Orang	3,97	Sangat Baik
Juli – September 2023	53 Orang	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2023	8 Orang	3,83	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2023		3,90	Sangat Baik
Januari – Maret 2024	104 Orang	3,94	Sangat Baik
April – Juni 2024	176 Orang	4	Sangat Baik
Juli – September 2024	218 Orang	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2024	139 Orang	3,99	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2024		3,98	Sangat Baik
Januari – Maret 2025	104 Orang	3,99	Sangat Baik
April – Juni 2025	98 Orang	3,98	Sangat Baik
Juli – September 2025	143 Orang	3,96	Sangat Baik
Oktober - Desember 2025	139 Orang	3,99	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2025		3,98	Sangat Baik

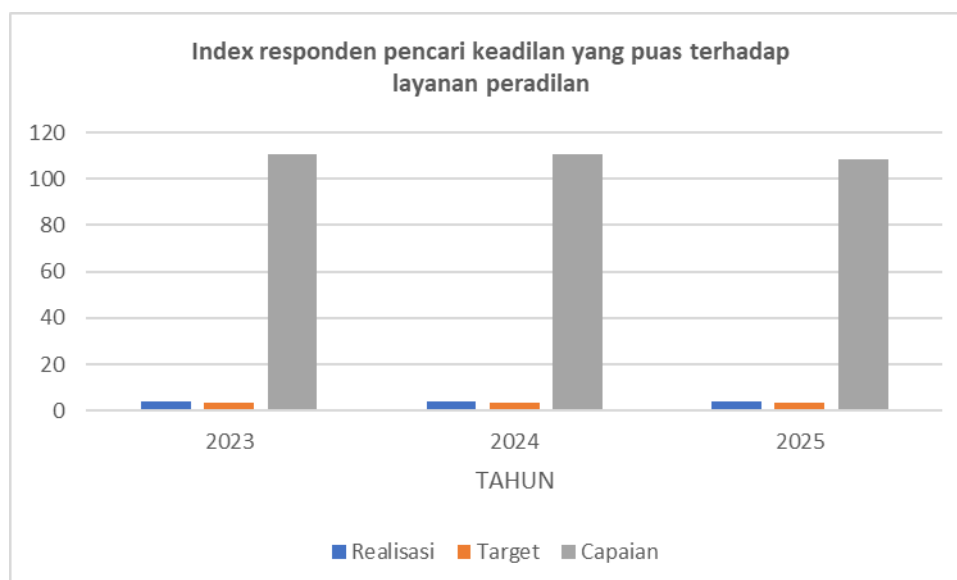
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sebesar 3,98 dan capaian 110,50 . Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata
U1.	Persyaratan	3.99
U2.	Prosedur	3.99
U3.	Waktu Pelayanan	3.99
U4.	Biaya / Tarif	3.97
U5.	Produk layanan	3.99
U6.	Kompetensi Pelaksana	3.99
U7.	Perilaku Pelaksana	3,98
U8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.99
U9.	Sarana dan Prasarana	3.97

Tabel 26. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Indeks Kepuasan Masyarakat	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2025	3,98	3,98	3,6	110,5
	2024	3,98	3,98	3,6	110,5
	2023	3,90	3,90	3,6	108,3

Grafik 13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2013-2025



Dari table di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indicator: Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah sebesar 3,6. Realisasi pada indicator tersebut sebesar 3,98. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 3 tahun (2023-2025), adalah 108,3, 110,5, dan 110,5, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim, berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Pencapaian selama tahun 2023-2025 selalu diatas 3,6. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,98, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan briefing petugas PTSP setiap hari untuk monitoring pelaksanaan tugas serta kendala yang dihadapi oleh petugas PTSP
- Peningkatan Kompetensi petugas PTSP melalui pelatihan pelayan prima yang bekerjasama dengan Lembaga yang berkompeten seperti Bank.
- Melaksanakan MOU dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) terkait pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSP setiap hari dan setiap bulan guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan rapat monev untuk menindaklanjuti hasil survey terhadap unsur pelayanan yang bernilai rendah

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA)
4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan adalah ukuran statistik kualitas pegawai berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi (pelatihan), kinerja (SKP), dan disiplin. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan melalui aplikasi MyASN BKN untuk memetakan profesionalitas.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 71. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “

Tabel 26. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	2025	79,52	79,52	71	112

Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dilihat dari aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI) sebesar 79,52.

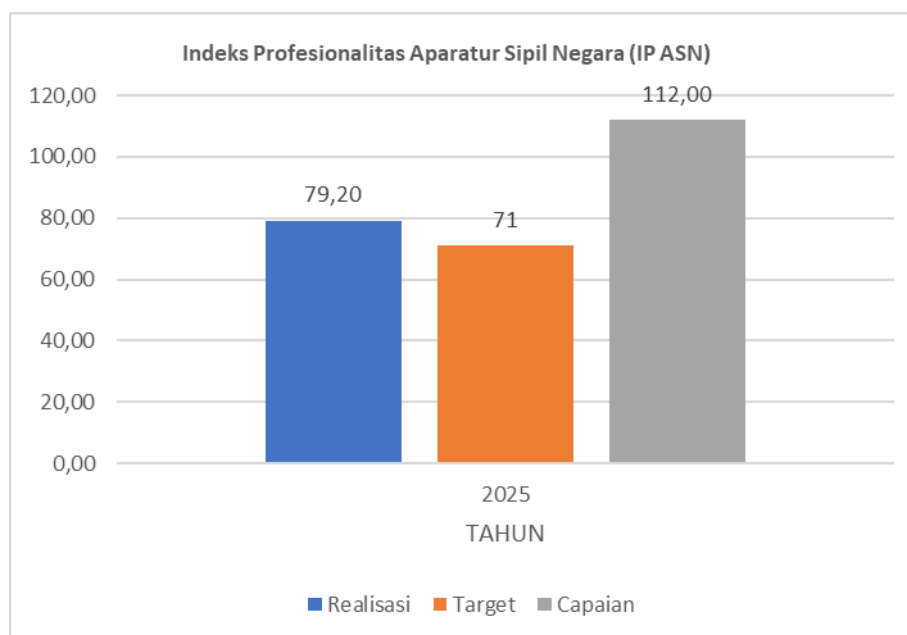
MONITORING IPASN SIKEP											TOTAL 1 ITEM.		
													
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG	
1	098991 - Pengadilan Negeri Muara Enim	46	21	79.52	sedang	23.10	26.19	25.24	5.00	-	-	11	

Metode yang dilakukan dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) ini adalah dilakukan secara kuantitatif berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin Pengukuran ini melibatkan penginputan dan pembaruan data secara berkala oleh ASN melalui aplikasi SIKEP.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebesar 79,52 (kategori sedang). Dengan jumlah pegawai sebanyak 46 orang, dan nilai masing-masing dimensi :

Kualifikasi : 23,10
 Kompetensi : 26,19
 Kinerja : 25,24
 Disiplin : 5

Grafik 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan adalah sebesar 71. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 79,52. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Pencapaian tahun 2025 diatas 71. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 79,52, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan sebesar 75. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemantauan berkala terhadap 4 dimensi IP ASN, termasuk evaluasi rutin terhadap hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kehadiran disiplin.
- Melakukan monitoring ketat terhadap pemutakhiran data mandiri di MyASN BKN, dan aplikasi SIKEP untuk memastikan setiap sertifikat diklat atau ijazah baru segera terinput untuk mendongkrak nilai dimensi kompetensi dan kualifikasi.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan:

1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam aplikasi e-Kinerja BKN kini direncanakan agar sinkron dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker, sehingga realisasi kinerja organisasi langsung berdampak pada nilai IP individu.
2. Validasi data pendidikan (Dimensi Kualifikasi - 25%) dilakukan secara berkala oleh tim Kepegawaian sebelum batas waktu penilaian IP ASN di akhir tahun.
3. Melakukan Rapat monitoring evaluasi setiap triwulan untuk memonitor progres input data.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh atasan langsung terhadap bawahan.
5. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis sistem informasi (seperti aplikasi SIKEP/aplikasi kinerja Mahkamah Agung).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan anggaran belanja (DIPA). Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bersifat spesifik dan dipantau secara berkala melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 90 . Pengukuran realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 27. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Ko)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
098991	Nilai	100	91,12	100	100	100	100	100	98,67	100%	0	98,67
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10	13,67	20	10	10	10	25				
	Nilai Aspek	95,56		100				100				

**Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)**

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Ko)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	92,97	100	0	0	98,75	100	78,82	80%	0	98,53
Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
Nilai Akhir	10	13,95	20	0	0	9,88	25				
Nilai Aspek	96,49		99,38				100				

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

DIPA	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
DIPA 01	98,67	90	98,67	109,63
DIPA 03	98,53	90	98,53	109,48
Rata-rata		90	98,6	109,56

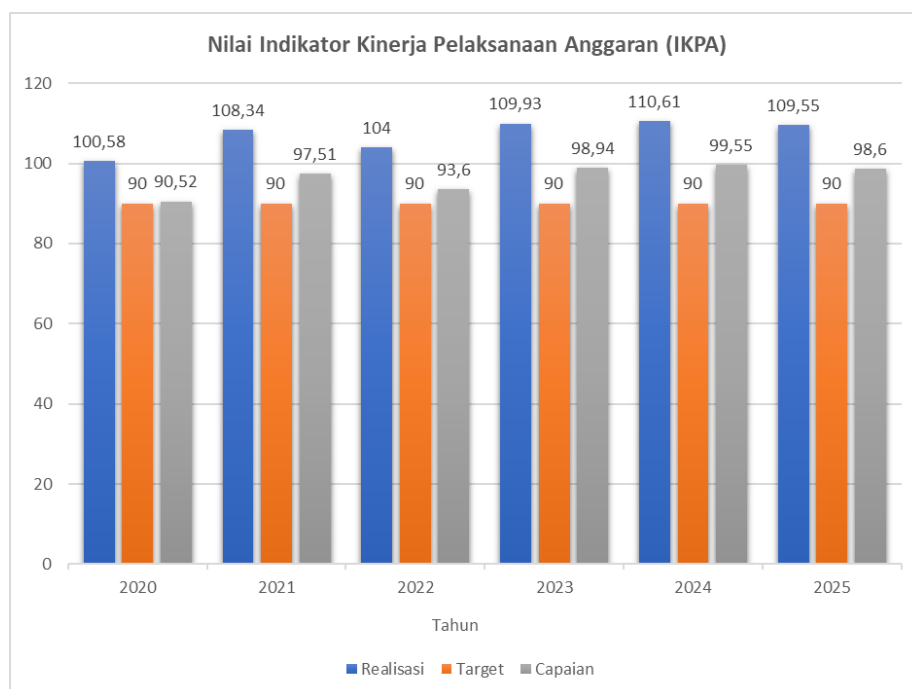
Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 98,67 dan untuk DIPA 03 sebesar 98,53. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Nilai IKPA ≥ 95 , termasuk kategori “**SANGAT BAIK**”, artinya Pengadilan Negeri Muara Enim berhasil melaksanakan pengelolaan anggaran tahun 2025.

**Tabel 30. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker
Pengadilan selama tahun 2020-2025**

TAHUN	DIPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	01	98.67	98.60	90	109.55
	03	98,53			
2024	01	99.10	99.55	90	110.61
	03	100			
2023	01	100	98.94	90	109.93
	03	97,88			
2022	01	90,71	93.60	90	104

	03	96,49			
2021	01	98,11	97.51	90	108.34
	03	96,91			
2020	01	90.21	90.52	90	100.58
	03	90,83			

**Grafik 15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3
Indikator 2 Tahun 2020-2025**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan adalah sebesar 90. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 98,60. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Pencapaian tahun 2025 diatas 90. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 98,60 , jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan 95. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Melakukan Penyelesaian Tagihan Tepat Waktu atau Memastikan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) segera setelah BAST diterima, sehingga terhindar dari pinalti indikator penyelesaian tagihan.
- Perencanaan penarikan dana di Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi belanja, dengan deviasi minimal (di bawah 5%).
- Memonitoring dan mengevaluasi secara rutin pada rapat internal bulanan untuk progres setiap indikator.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan:

1. Pendaftaran kontrak ke KPPN dilakukan tepat waktu sesuai regulasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024.
2. Perencanaan Matang Penyusunan anggaran di awal tahun yang sangat akurat sehingga tidak memerlukan banyak perubahan di tengah jalan..
3. Pimpinan Satker (KPA dan Sekretaris) aktif melakukan rapat monitoring mingguan untuk mengevaluasi kinerja di aplikasi OM-SPAN.
4. Penyelesaian Tagihan atau Memastikan penyelesaian tagihan/SPM dilakukan tepat waktu, maksimal 5 hari kerja setelah BAST/penyelesaian pekerjaan.

c. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024. Nilai Kinerja ANgggaran dapat dilihat melalui aplikasi monev.kemenkeu.go.id Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektifitas dan efisiensi. Dengan bobot :

- a. Efektifitas (75 %), yang terdiri dari :
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK)

**Tabel 31. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran
DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.01.098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	100	100	100	100

**Tabel 32. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran
DIPA 03(Badan Peradilan Umum)**

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	005.03.099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	85	100	100	0

Tabel 33. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran

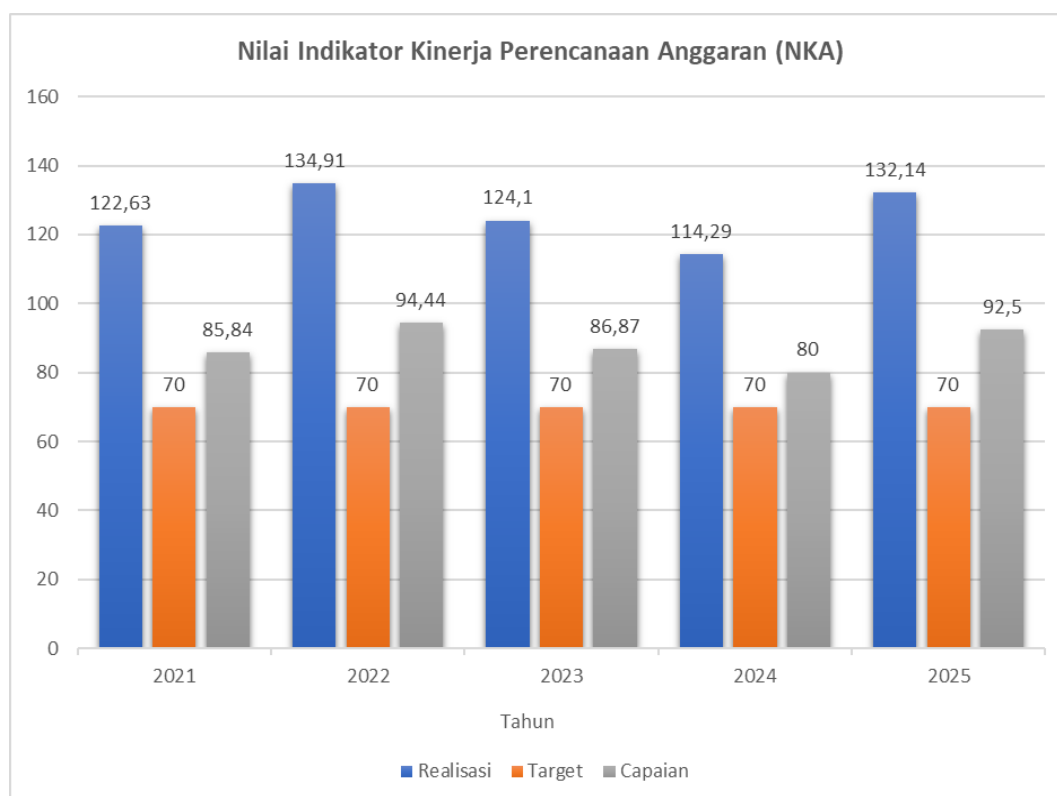
DIPA	Nilai Indikator Perencanaan	Target	Realisasi	Capaian
DIPA 01	100	70	100	142,86
DIPA 03	85	70	85	121,43
Rata-rata		70	92,5	132,14

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 100 dan untuk DIPA 03 sebesar 85. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 > 90, termasuk kategori “**SANGAT BAIK**”, dan Kinerja Perencanaan DIPA 03 81-90, termasuk kategori “**BAIK**”, artinya Pengadilan Negeri Muara Enim berhasil melaksanakan perencanaan anggaran tahun 2025.

Tabel 34. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan (NKA) selama tahun 2021-2025

TAHUN	DIPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	01	100	92,5	70	132,14
	03	85			
2024	01	75	80	70	114,29
	03	85			
2023	01	86,37	86,87	70	124,10
	03	87,37			
2022	01	89,17	94,44	70	134,91
	03	99,70			
2021	01	86,49	85,84	70	122,63
	03	85,19			

Grafik 16. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 3 Tahun 2021-2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Satker Pengadilan adalah sebesar 70. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 92,50. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Pencapaian tahun 2025 diatas 90. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 92,5, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Satker Pengadilan 75. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Melaksanakan perencanaan anggaran pada awal tahun dengan tepat
- Monitoring terhadap realisasi capaian output setiap bulannya.
- Pelaporan capaian ouput tepat waktu setiap bulannya.
- Monitoring terhadap Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progress Capaian RO pada aplikasi SAKTI.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan:

1. Pimpinan Satker (KPA dan Sekretaris) aktif melakukan rapat monitoring bulanan untuk mengevaluasi rapor di aplikasi Monev.Kemenkeu.go.id
2. Memastikan pengisian data capaian output pada Aplikasi SAKTI Modul Komitmen/Penganggaran dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
3. Pastikan setiap Rincian Output (RO) yang direncanakan dapat dicapai 100% atau lebih, sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Mengimplementasikan SBK secara tepat dalam perancangan anggaran untuk meningkatkan efisiensi.

5. Pastikan data RO pada sistem aplikasi (SAKTI) sudah benar, baik dari segi penambahan maupun penghapusan, sesuai kriteria DJA
6. Meminimalisir revisi DIPA yang tidak mendesak untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

d. Nilai Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah alat ukur kinerja (skala 1-4) yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN), berfungsi sebagai komponen evaluasi Reformasi Birokrasi. IPA mengukur kepatuhan, akuntabilitas, penggunaan standar (SBSK), dan produktivitas aset untuk mewujudkan pengelolaan aset yang optimal. Indeks Pengelolaan Aset dapat dilihat dari aplikasi e-sadewa.mahkamahagung.go.id. Indeks Pengelolaan Aset terdiri dari 7 parameter yaitu :

Parameter 1 - Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%)

Parameter 2 - Realisasi PNPB Pengelolaan Aset (Bobot 15%)

Parameter 3 - Ketepatan waktu dokumen RKBMN (Bobot 25%)

Parameter 4 - Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)

Parameter 5 - Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)

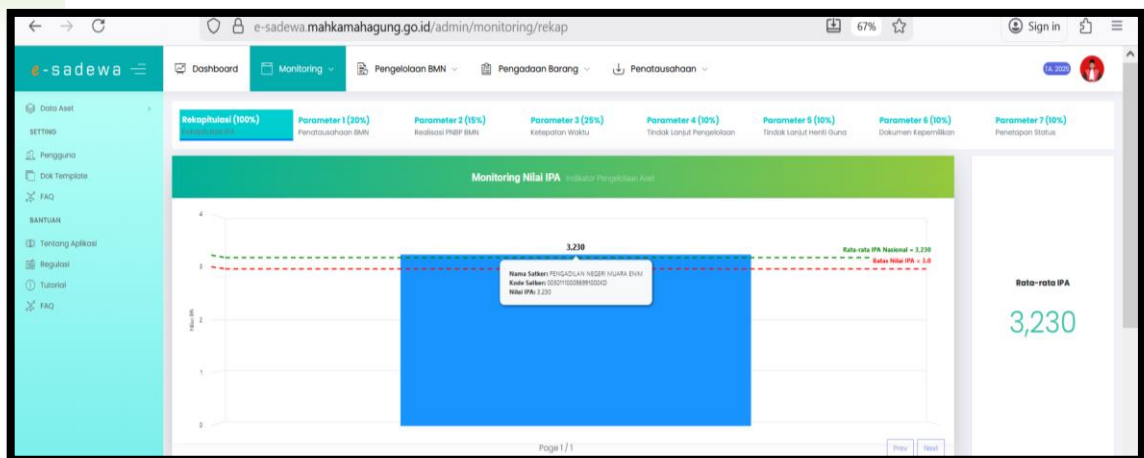
Parameter 6 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)

Parameter 7 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)

Tabel 35. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3			Parameter 4	Parameter 5	Parameter 6	Parameter 7	TOTAL NILAI IPA
(20%)		(15%)		(5%)			(10%)	(10%)	(10%)	(10%)	
Penatausahaan BMN		Realisasi PNPB Pengelolaan Aset		Ketepatan waktu dokumen RKBMN			Tindak lanjut pemanfaatan BMN	Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya	BMN memiliki dokumen kepemilikan	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	
Kesesuaian & Kelengkapan transaksi BMN	Penjelasan telaah data BMN	Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN	Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang	Ketepatan waktu usulan RKBMN	Ketepatan waktu LBKP	Ketepatan & kelengkapan Wasdal					
3	4	1	3	3	3	3					
3	4	1	3	3	3	3	4	4	4	3	3.23

Nilai Indeks Pengelolaan Aset dari aplikasi e-sadewa

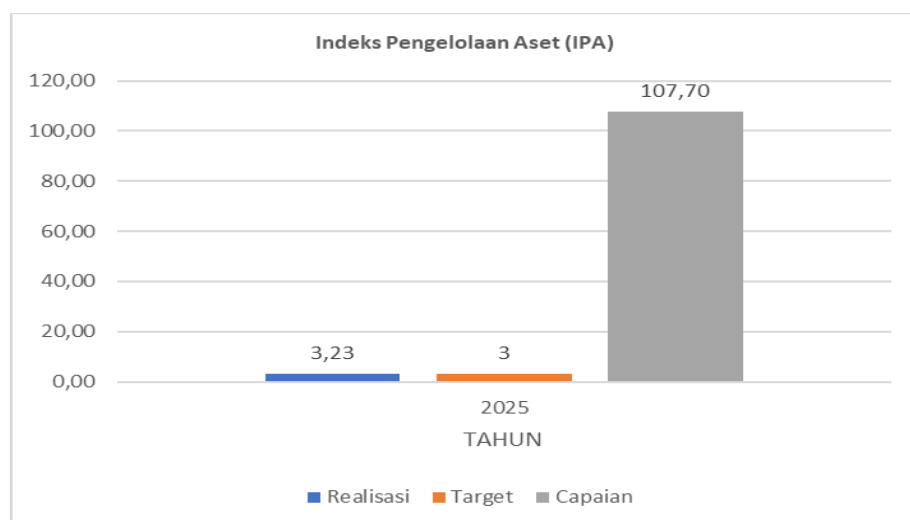


Pada tahun 2025, Indeks Pengelolaan Aset sebesar 3,23. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Km.6/2025 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025. Penilaian Indeks Pengelolaan Aset sebesar 3,23, termasuk kategori **“BAIK”**.

Tabel 36. Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025

Tahun	Indeks Pengelolaan Aset	Target	Realisasi	Capaian
2025	3,23	3	3,23	107,7

Grafik 17. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 4 Tahun 2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indicator: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah sebesar 3. Realisasi pada indicator tersebut sebesar 3,23. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
- Pencapaian tahun 2025 diatas 3. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,23, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Pelaporan pengawasan pengendalian aset secara tepat waktu
- Pembuatan laporan Rencana Kebutuhan BMN tepat waktu
- Aset tanah telah bersertifikat
- Pembuatan Penetapan Status Penggunaan terhadap aset BMN

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan:

1. Inventarisasi dan Tertib Administrasi Aset atas kondisi aset baik, rusak ringan dan rusak berat
2. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Aset.
3. Melaksanakan penghapusan terhadap aset-aset yang sudah rusak berat
4. Penguatan teknologi informasi untuk memantau aset seperti : Sistem Informasi Manajemen Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian Aset secara berkala dan tepat waktu.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset oleh Kuasa Pengguna Barang, kasubbag Umum dan Keuangan sebagai validator aset dan operator SIMAN

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.

a. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Layanan Sarana Internal .

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pengadaan Kendaraan Bermotor

b. Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Layanan Dukungan Manajemen Internal

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Layanan Umum, yang terdiri dari:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Koordinasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Kimwasmat

➤ Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat

➤ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pos Bantuan Hukum

➤ Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

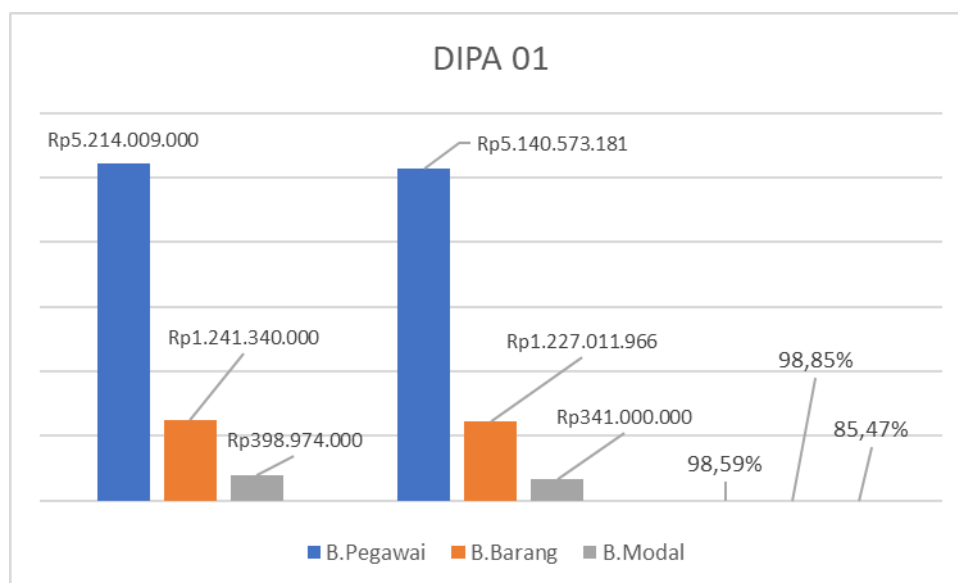
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2025, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

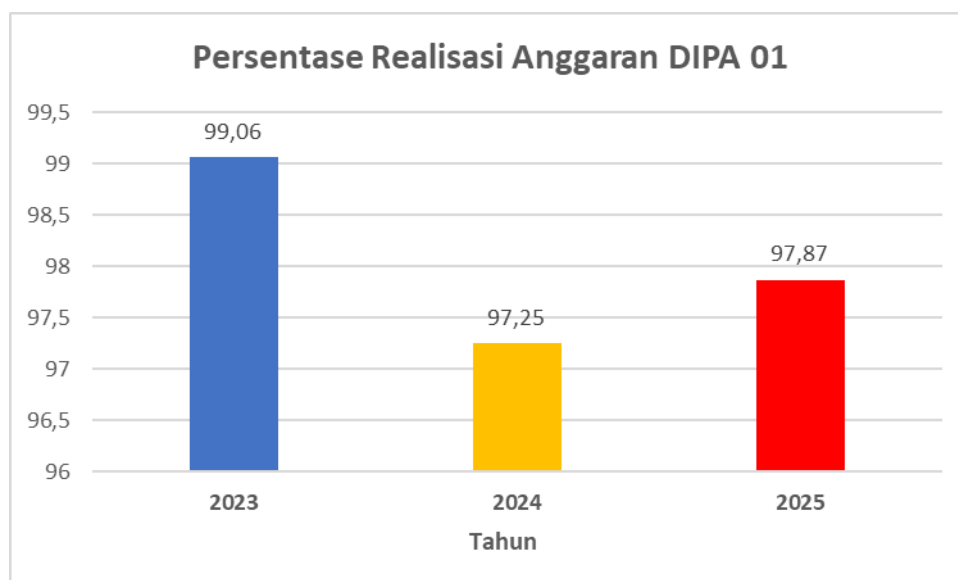
Pada tahun 2025 realisasi dan persentase penyerapan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 5,214,009,000,-	Rp. 5,140,573,181,-	98,59 %
2	Belanja Barang	Rp. 1,241,340,000,-	Rp. 1,227,011,966,-	98,85 %
3	Belanja Modal	Rp. 398,974,000,-	Rp. 341,000,000,-	85.47 %

Grafik 18. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja**Tabel 38. Perbandingan anggaran DIPA 01 tahun 2023-2025**

TAHUN	PAGU 01	REALISASI	PERSENTASE
2023	4.390.610.000	4.349.176.700	99,06
2024	4.683.626.000	4.683.626.000	97,25
2025	6.854.323.000	6.708.585.147	97,87

Grafik 19. Realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2023-2025

Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Pada tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp 6.854.323.000, Realisasi anggaran sebesar Rp 6.708.585.147 dengan persentase realisasi sebesar 97,87 %. Persentase realisasi naik sebesar 0,52 % dari tahun 2024. Dimana pada tahun 2025 terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp 2.170.697.000 pada jenis belanja pegawai dan belanja modal.

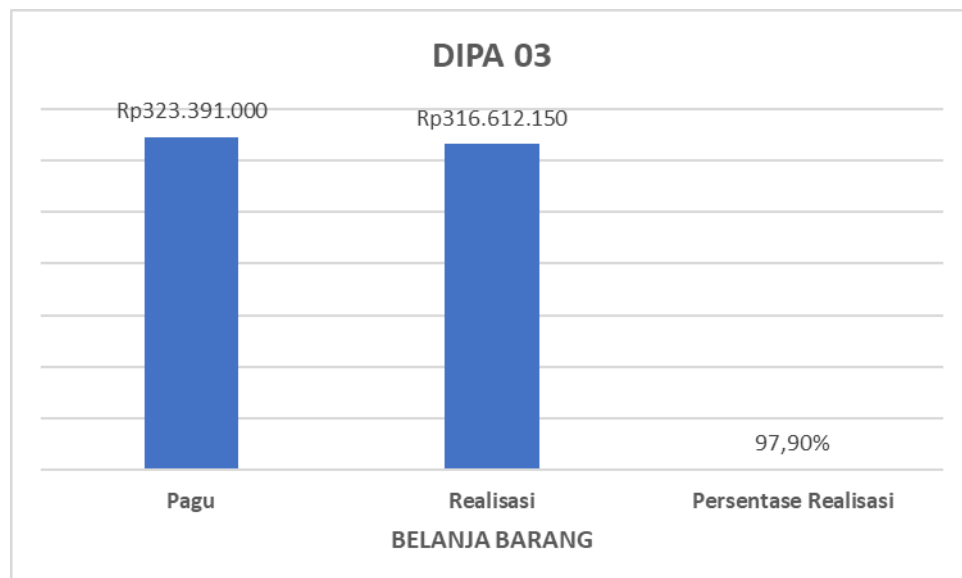
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2024 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (03) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi anggaran DIPA 03 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	B.Barang	Rp. 323,391,000,-	Rp. 316,612,150,-	97,90 %

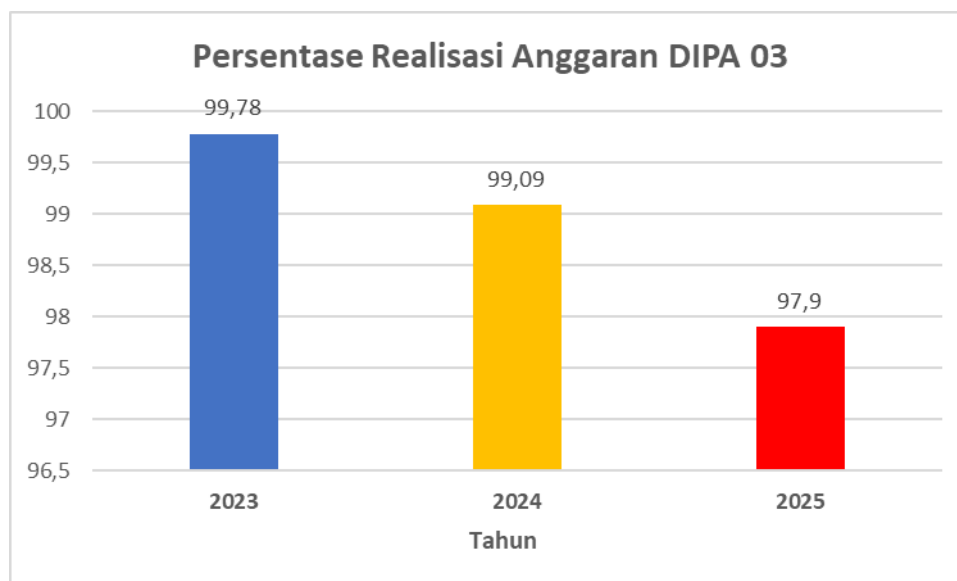
Grafik 20. Realisasi anggaran DIPA 03 per jenis belanja



Tabel 40. Perbandingan anggaran DIPA 03 tahun 2023-2025

TAHUN	PAGU 03	REALISASI	PERSENTASE
2023	332.000.000	331.269.370	99,78
2024	358.940.000	355.669.050	99,09
2025	323.391.000	316.612.150	97,9

Grafik 21. Realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2023-2025



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Pada tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp 323.391.000, Realisasi anggaran sebesar Rp 316.612.150 dengan persentase realisasi sebesar 97,90 %. Persentase realisasi turun sebesar 1,19 % dari tahun 2024. Dimana pada tahun 2025 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp 35.549.000 pada jenis belanja barang..

C. DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Sesuai dengan frame work dan matriks pendanaan pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Muara Enim, dukungan anggaran pada Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Dukungan Anggaran terhadap Kinerja

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI ALOKASI	PERSENTASE ALOKASI
		2025			2025		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern				Menggunakan anggaran DIPA 03 : 327,301,000	316.612.150	97,90
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %	98,6 %	109,4 %	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100%	100%	100%	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	86,21%	107,76%	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	66,67%	133,34 %	Menggunakan anggaran biaya proses		
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8,38 %	104, 75 %	278,281,000	271,704,550	97,60

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI ALOKASI	PERSENTASE ALOKASI
		2025			2025		
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	3,23%	161,5%	Menggunakan anggaran biaya proses		
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%	25%	250 %	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.10 Persentase Perkara Perdata, yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%	Menggunakan anggaran biaya proses		
	1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	278,281,000	271,704,550	97,60
	1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	278,281,000	271,704,550	97,60
	02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				Menggunakan anggaran DIPA 03 : 327,301,000	316.612.150	97,90
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,98	110,5	278,281,000	271,704,550	97,60
	03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				Menggunakan anggaran DIPA 01 : 6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
	3.1 Indeks Profesionalitas ASN	71	79,52	112	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
	1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	98,55	109,5	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
	1.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	92,5	132,14	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
	3.3 Indeks Pengelolaan Aset	3	3,23	107,7	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87

Selain anggaran yang terdapat dalam DIPA 01 dan DIPA 03, Pengadilan Negeri Muara Enim juga mengelola biaya proses perkara. Biaya perkara atau dalam aturannya disebut sebagai Biaya Proses Penyelesaian Perkara, merupakan biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata. Biaya tersebut digunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, pemanggilan pihak-pihak/pemberitahuan putusan yang dijalankan oleh juru sita, dan bea materai.

Tabel 42. Laporan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim Periode Januari 2025 s.d Desember 2025 :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan				
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas Dibrangkas
1	Januari	Biaya Perkara	Rp 887,580,588	Rp 8,287,250	Rp 15,510,050	Rp 880.357.788	Rp 16.111.409
2	Februari	Biaya Perkara	Rp 880.357.788	Rp 1.189.000	Rp 62.626.136	Rp 818.920.652	Rp 11.079.009
3	Maret	Biaya Perkara	Rp 818.920.652	Rp 27.204.500	Rp 4.301.600	Rp 841.823.552	Rp 6.461.409
4	April	Biaya Perkara	Rp 841.823.552	Rp 4.789.500	Rp 8.441.450	Rp 838.171.602	Rp 17.651.459
5	Mei	Biaya Perkara	Rp 838.171.602	Rp 15.555.250	Rp 14.090.850	Rp 839.636.002	Rp 18.493.109
6	Juni	Biaya Perkara	Rp 839.636.002	Rp 8.159.000	Rp 18.584.200	Rp 829.210.802	Rp 15.241.209
7	Juli	Biaya Perkara	Rp 829.210.802	Rp 124.491.500	Rp 126.336.850	Rp 827.365.452	Rp 2.769.109
8	Agustus	Biaya Perkara	Rp 827.365.452	Rp 18.610.250	Rp 15.424.400	Rp 830.551.302	Rp 2.279.109
9	September	Biaya Perkara	Rp 830.551.302	Rp 11.883.500	Rp 19.300.500	Rp 823.134.302	Rp 2.479.159
10	Oktober	Biaya Perkara	Rp 823.134.302	Rp 17.985.000	Rp 10.662.500	Rp 830.456.802	Rp 7.147.159
11	November	Biaya Perkara	Rp 830.456.802	Rp 20.409.500	Rp 26.490.750	Rp 824.375.552	Rp 5.542.809
12	Desember	Biaya Perkara	Rp 824.375.552	Rp 5.270.000	Rp 15.007.200	Rp 814.638.352	Rp 6.186.209

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Pengadilan Negeri Muara Enim, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 43 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2025			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90 %	98,6 %	109,4 %	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	86,21%	107,76%	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	66,67%	133,34 %	Menggunakan anggaran biaya Proses		
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	8%	8,38 %	104, 75	327,301,000	316.612.150	97,90

		pendekatan keadilan restoratif						
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	28	3,23%	161,5%	Menggunakan anggaran biaya Proses		
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%	25%	250 %	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Menggunakan anggaran biaya Proses		
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	327,301,000	316.612.150	97,90
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	327,301,000	316.612.150	97,90
Rata-rata capaian Sasaran Strategis I					113,50	Capaian Anggaran		97,90
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,98	110,5	327,301,000	316.612.150	97,90
Rata-rata capaian Sasaran Strategis II					110,5	Capaian Anggaran		97,90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71	79,52	112	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90	98,55	109,5	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	92,5	132,14	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3	3,23	107,7	6.854.323.000	6.708.585.000	97,87
Rata-rata capaian Sasaran Strategis III					115,34	Capaian Anggaran		97,87

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Muara Enim, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan EFEKTIF terhadap capaian kinerja sasaran strategis organisasi.

Dari kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 dilakukan penghitungan realisasi secara detail terhadap satu (2) program yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan anggaran Rp. 327,301,000 dan terealisasi sebesar Rp. 316.612.150 (97,90%), dengan nilai capaian indicator kinerja 113,50 % dan 110,5 %
2. Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp.6.854.323.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.708.585.147 (97,87%), dengan nilai capaian indicator kinerja 115,34%

E. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri Muara Enim mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai target yang ditentukan.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Muara Enim telah memadai, kemudian dapat diberikan saran dan rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

UNIT KERJA	NILAI PER KOMPONEN					
	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	NILAI	Kategori
PN MUARA ENIM	24,00	24,90	12,30	18,75	79,95	BB "SANGAT BAIK"

Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan :

1. Mengisi secara berkala capaian kinerja perbulan melalui aplikasi KOMDANAS, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja.
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja dengan membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur di Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menghasilkan capaian kinerja yang diharapkan.
4. Meningkatkan kualitas kompetensi ASN yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat SAKIP.

Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Muara Enim baik terhadap peningkatan implementasi SAKIP, pemanfaatan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja telah ditindaklanjuti dan juga telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palembang terkait Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Pengadilan Negeri Muara Enim :

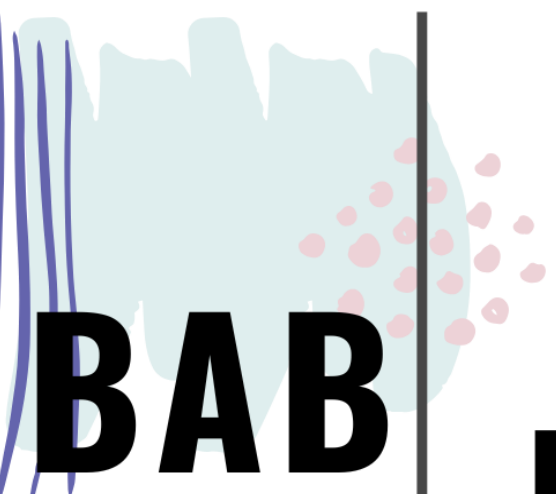
LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB								
NO	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. PERENCANAAN								
1	Pada data dukung dengan eviden mencantumkan tanggal publikasi agar diketahui publikasi di website tepat waktu	Dokumen yang dilampirkan tidak memuat tanggal publikasi	Input Screenshoot Program Kerja ke dalam link Google Drive	Sep-25	Sep-25	Subbag PTIP	Telah diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1RZ6852kpaWhMWjVs-BHYAo7JY5CHZPu8?usp=drive_link
2	Tambahkan data dukung analisa yang menggambarkan sasaran kegiatan, indikator antar bidang	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan keterkaitan antar bidang dengan tugas dan fungsi lain (crosscutting)	Menambahkan data dukung analisa pada Google Drive	Sep-25	Sep-25	Subbag PTIP	Telah diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1feQFDHQRfZmsoCnedqAWWfCpY1FtdRMc?usp=drive_link
3	Satker agar Melampirkan data dukung: PK Individu 2024 & 2025 seluruh pegawai (Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan	PK Individu 2024 & 2025 belum keseluruhan di lampirkan	Melampirkan data dukung PK Individu 2024 dan 2025 pada Google Drive	Sept 2025	13 Sept 2024	Subbag Kepegawaian	Telah diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1YEO6QQ7skxZnFujFJqNR86GWYfJ8eZMQ?usp=drive_link
4	Agar PN Muara Enim melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (triwulan)	Satker Belum melampirkan data dukung dengan dokumen laporan, monev, dan Tindak lanjut SKM per triwulan 2024	Satker melampirkan data dukung pada Google Drive sebagai Tindak lanjut	Sept 2025	13 Sept 2024	Subbag PTIP	Telah diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1PT9cbrhXugMEIMrgwGa5Tu0WwGk0-0Wr?usp=drive_link
B. PENGUKURAN KINERJA								
1	Agar Kedepannya setiap penomoran yang digunakan sesuai dengan SK sekma nomor : 627/SEK/SK/VII/2023	Kode Penomoran yang digunakan pada SK tidak sesuai dengan SK Sekma Nomor 627/SEK/SK/VII/2023	SK Sudah Input ke dalam link Google Drive	Sep-25	29 Agst 2024	Subbag Kepegawaian	Telah diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1FWKXaPlbxfrYO_ERln2-G03_OYJ8YzPC?usp=drive_link

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

C. PELAPORAN KINERJA								
1	Lengkapi data dukung dokumen LkjiP dengan membubuhi stempel pada TTD previu;	Satker Telah mereviu dokumen LKJIP namun tidak ada stempel pada TTD pereviu;	TTD dan Stempel telah diperbaharui pada data tersebut.	Sep-25	13 Agst 2024	Subbag PTIP	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1s5z3fF7Em37YM2jW30GUrbucpNcn-eON?usp=drive_link
2	Tambahkan Data dukung Evaluasi Capaian Kinerja Per Caturwulan, & Trimester; Dokumen Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan.	Eviden yang dilampirkan belum memberikan informasi bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam menyusun aktivitas untuk mencapai kinerja	Sudah Input ke dalam link Google Drive	Sep-25	29 Agst 2024	Subbag PTIP	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1ty7OeJVbiE0DwrOWkeqvldcUgFYi-l-K?usp=drive_link
3	Agar melampirkan dokumen Revisi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 secara lengkap (Keseluruhan Revisi)	Dokumen Revisi Anggaran DIPA 01 & DIPA 03 2024 belum lengkap	Melengkapi Dokumen Revisi DIPA 01 & 03 ke dalam link Google Drive	Sep-25	26 Agst 2024	Subbag PTIP	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1fe2z_ugW0tW2tzBdhMUUusrH6ZpTvKdD?usp=drive_link
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL								
1	Tambahkan data dukung berupa Analisis perbandingan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan format/standar evaluasi internal yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI	Data dukung yang dilampirkan belum menggambarkan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melampirkan data dukung evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sep-25	15 Agst 2024	Subbag Kepegawaian	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1GQ56S6hDEYS1DBN2X35Rd80H37paCF1V?usp=drive_link
2	Tambahkan data dukung berupa dokumen analisis evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan evisiensi kinerja	Dokumen hanya menampilkan tabulasi terkait tindak lanjut hasil evaluasi pada masing-masing indikator penilaian sakiP.	membuat tindak lanjut analisis atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan pedalaman yang memadai	Sep-25	15 Agst 2024	Subbag Kepegawaian	Telah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1H1yIMUkQI8odeN8tHmrXYevQd69fap1Y?usp=drive_link

Sumber : Tindak lanjut LHE AKIP tahun 2024 (dikirim melalui email ke Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 September 2025)



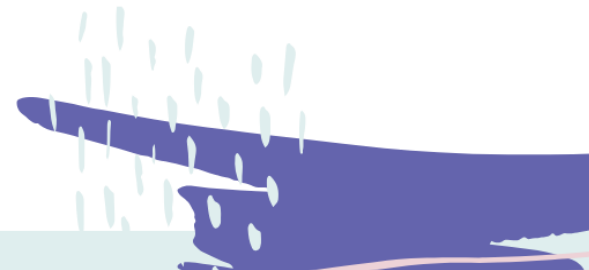
BAB IV

A

Kesimpulan

B

Saran



BABIV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2025 yang dituangkan menjadi 3 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah prosespenyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinantinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN

CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 7. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muara Enim, 2 Februari 2026

Pereviu I


 (Hendrik, SH)

Pereviu II


 (Arman, SH)

MATRIKS KINERJA 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85	90	90	90	90	90						
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	100						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	80	80	80	80	80						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50	50						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	8	10	10	10	10						

LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2	2	5	5	5	5						
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10	10	25	25	25	25						
1.10 Persentase Perkara Perdata, yang menggunakan e- Court	100	100	100	100	100	100						
1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100						
1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90	100	100	100	100	100						
02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	Kepaniteraan
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	90	90	90	90	90						
03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							5,323,052,000	7,123,000,000	7,125,000.000	7,220.000.000	7.230.000,000	Kesekretariatan
3.1 Indeks Profesionalitas ASN	75	71	71	71	71	71						
1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90	90						
1.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	70	70	70	70	70						
3.3 Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3	3						

LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025

MATRIKS PENDANAAN 2025-2029

Program/Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM													
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								327,301,000	327,301,000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	KEPANITERAAN
		Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											
		1. Jumlah Pelaksanaan penyelesaian perkara secara tepat waktu	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara						
		2. Jumlah pelaksanaan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara	700 perkara						
		3. Jumlah Pelaksnaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara						

	4. Jumlah Pelaksanaan pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara						
	5. Jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan	500 putusan						
	6. Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara						
	7. Jumlah pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara						
	8. Jumlah Pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara						
	9. Jumlah Pelaksanaan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara						
	10. Jumlah Pelaksanaan perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	200 perkara	200 perkara	200 perkara	200 perkara	200 perkara						
	11. Jumlah Pelaksanaan perkara pidana, yang	650 perkara	650 perkara	650 perkara	650 perkara	650 perkara						

	dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)											
	12. Jumlah responden survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Muara Enim	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden	300 Responden						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							5,323,052,000	7,123,000,000	7,125,000.000	7,220.000.000	7.230.000,000	KESEKRETARIATAN
	Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset											
	1. Indeks Profesionalitas ASN	71	71	71	71	71						
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	90	90	90	90						
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	50	70	70	70	70						
	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3	3	3	3						
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							398,974,000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	KESEKRETARIATAN
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Pengadilan											
	Jumlah pelaksanaan belanja modal yang ditindak lanjuti	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg						



(continued from page 6)



Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : 1959/KPN.W6-U6/ RA1.10/XI/2025



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI QURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 19 November 2025

Pihak Kedua

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA



Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum
NIP. 196108101985121001

Pihak Pertama

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KETUA



ARI QURNIAWAN, SH., MH
NIP. 19790711 200212 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : 1959/KPN.W6-U6/ RA1.10/XI/2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama	Rp. 6.854.323.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 323.391.000,-

Palembang, 19 November 2025

Pihak Kedua

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA**



Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum
NIP. 196108101985121001

Pihak Pertama

**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KETUA**



ARI QURNIAWAN, SH., MH
NIP. 19790711 200212 1003



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 58 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
3. ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan
9. menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Inidkator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIMKELAS IB.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 1607/KPN.W6-U6/SK/KP3.4.1/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

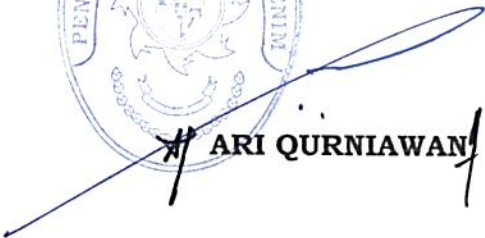
Ditetapkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Januari 2026


KETUA
MARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 58 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ari Qurniawan, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Miryanto, SH.,MH
3.	Pengarah	Harmen, SH
4.	Koordinator	Yurika Ariani, S.T, M.M.
5.	Sekretaris	Rulita Widayanti, A.Md.T.
6.	Tim Pengolah Data	1. Finna Pastri Siregar, S.H. 2. Iwan Fajri, A.Md. 3. M.Juristianda Hadi Putra, S.H 4. Lia Permata Sari, S.H. 5. Budi Dermawan, S.T. 6. Nanda, A.Md.A.B. 7. Desi Robiansyah
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SH., MM


KETUA

ARI QURNIAWAN



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Nomor : 53 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerjaInstansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang pembentukan tim penyusun laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 1605/KPN.W6-U6/SK/OT.6/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

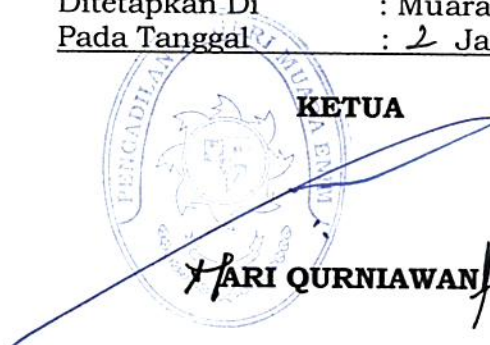
KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB;

KETIGA : Memerintah kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbiakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA

HARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 57 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengangung Jawab	Ari Qurniawan, SH.,MH.
2.	Koordinator Validasi data	Harmen, S.H.
3.	Ketua	Yurika Ariani, S.T., M.M.
4.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, S.H., M.M.
5.	Anggota	1. Finna Pastri Siregar, S.H. 2. Iwan Fajri, A.Md. 3. Nanda, A.Md.A.B. 4. M.Juristianda Hadi Putra, S.H. 5. Lia Permata Sari, S.H. 6. Rulita Widayanti, A.Md.T. 7. Budi Dermawan, S.T. 8. Desi Robiansyah
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H. 2. Arman, S.H. 3. Alia Desnani, S.H., M.H 4. Hendrik, S.H 5. Kms. Muhammad Amin, S.H., M.M.


KETUA

ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 3 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penganggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
2.	Koordinator Validasi data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkordinasikan perlaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur pengawasan Intern pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas


KETUA

ARI QURNIAWAN



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 23 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

STRATEGIS (RESTRA) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri muara Enim Tahun 2025-2029 Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 1604/KPN.W6-U6/RA1.3/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

 **KETUA**
ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 23 /KPN.W6-U6/RA1.3/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ari Qurniawan, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Miryanto, SH
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Harmen, SH
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Yurika Ariani, S.T, M.M.
5.	Pelaksana	Rulita Widayanti, A.Md.T.
6.	Tim Pengolah Data	1. Finna Pastri Siregar, S.H. 2. Iwan Fajri, A.Md. 3. M.Juristianda Hadi Putra, S.H 4. Lia Permata Sari, S.H. 5. Astory, S.H 6. Nanda, A.Md.A.B. 7. Budi Dermawan, S.T. 8. Desi Robiansyah
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SH., MM


KETUA

ARI QURNIAWAN



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I

15 APRIL 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 14 April 2025

Nomor : 630/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNPN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2025. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 15 April 2025
Waktu : 09.00 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan I

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No :
2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2024

Pukul : 09.00 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara
Enim.

Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan Maret 2025
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2025 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

3. Pada Triwulan I (Januari - Maret) 2025 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	72,41%	80,45%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100%	100%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	11,76%	23,52%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	97,98%	108,87%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	100%	111,11%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0%	%0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,78%	110,87%
Rata-rata capaian sasaran strategis I					76,40%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi	2	0%	0%
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,67%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis III					50%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	-	-
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					-

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - f. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Para pihak tidak hadir dipersidangan	Monitoring terhadap perkara perdata, yang diselesaikan tepat waktu
2.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 34 perkara. Sampai dengan triwulan I, baru ada 4 perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Restoratif Justice	Monitoring terhadap perkara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
3.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
4.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana.
5.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan Triwulan I belum ada perkara yang mengajukan untuk diselesaikan dengan Prodeo	Monitoring terhadap perkara prodeo yang jika memenuhi syarat akan diajukan Prodeo

6.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan I, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi
----	--	--	---

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - e. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - i. Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - j. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - k. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - l. Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - DIPA 01 sebesar 100 %
 - DIPA 03 sebesar 100 %

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (JAN – MAR 2025)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Gugatan	12	4	90 %	72,41 %	80,45 %
Gugatan Sederhana	13	13			
Permohonan	4	4			
TOTAL	29	21			

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Pidana Biasa	177	177	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	9	9			
TOTAL	186	186			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Jumlah perkara yang diajukan RJ	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
34	4	50%	11,76 %	23,52 %



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW I	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
	a	b	(a-b)			
Pidana	186	2	184	90 %	97,98 %	108,87 %
Perdata	12	2	10			
TOTAL	198	4	194			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW I	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
	a	b	(a-b)			
Pidana	181	0	181	90 %	100 %	111,11 %
Perdata	12	0	12			
TOTAL	193	0	193			



BerAKHLAK ² bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW I	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
1	0	50 %	0	0

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah :
Karena tidak ada perkara anak yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi



BerAKHLAK ² bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW I	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
99,78	101	90 %	99,78 %	110,87 %



BerAKHLAK ² bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Gugatan	12	12	100 %	100 %	100 %
Gugatan Sederhana	13	13			
Permohonan	4	4			
TOTAL	29	29			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Pidana Biasa	177	177	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	9	9			
TOTAL	186	186			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW I	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
6	0	2 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : Para Pihak yang tidak mau berdamai dan mempertahankan pendapatnya masing-masing



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW I	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
2 perkara	0	0	100 %	0	0
TOTAL	0	0			



SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW I	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
32	32	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW I TAHUN 2024	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti (dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
1	aanmaning	50 %	-	-

Jumlah permohonan eksekusi : Jumlah permohonan eksekusi yang di ajukan pihak di tahun berjalan

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan : jumlah pelaksanaan eksekusi

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada permohonan eksekusi yang masuk di tahun 2024



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW I	TRW I	TRW I
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	90%	72,41%	80,45%
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	50%	11,76%	23,52%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	97,98%	108,87%
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	100 %	111,11 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	50	0	0
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99,78 %	110,87%
Rata-rata capaian sasaran Strategis I				76,40%



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW I	TRW I	TRW I
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II				66,67 %



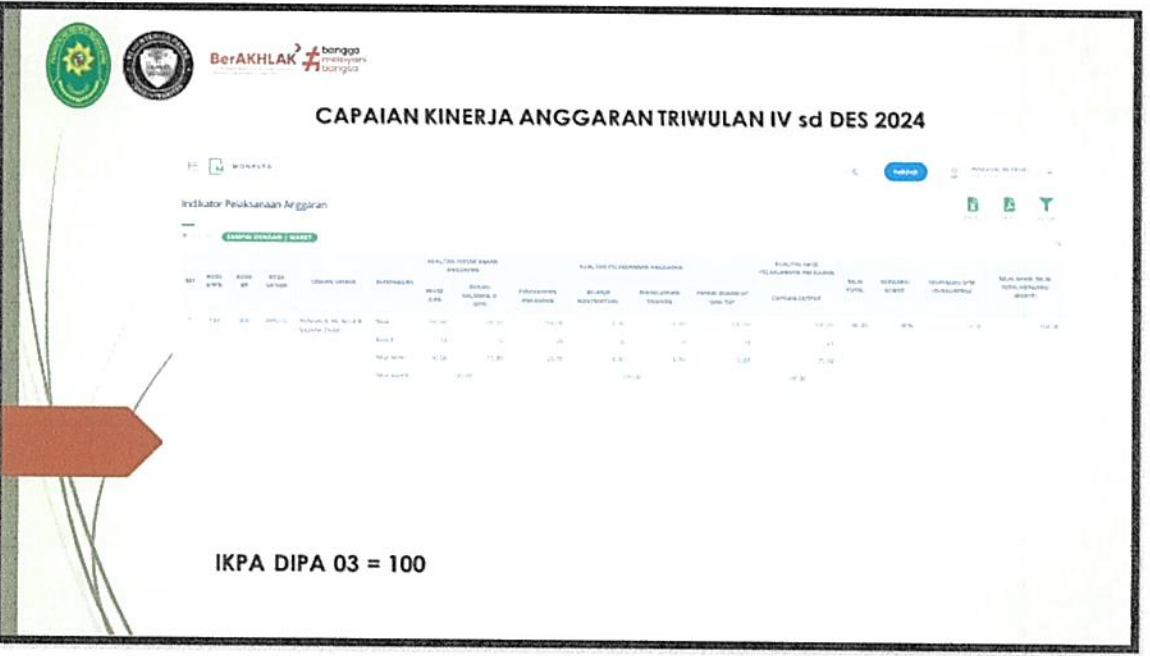
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			50 %



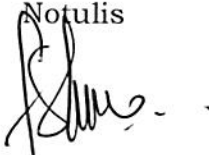
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	-	-
Rata-rata capaian sasaran Strategis IV			-



4. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis



Finna PASTRI SIREGAR

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



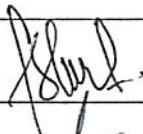
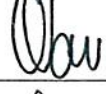
Ari Qurniawan

DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

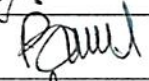
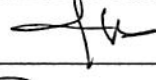
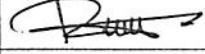
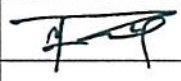


	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/KPN.W6-U6/UND.KP4.1.2/IV/2025
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	Tanggal	April 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI QURNIAWAN,S.H.,M.H. NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	MIRYANTO, SH.,MH 198401252009041003	HAKIM	
4.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
5.	SERA RICKY SWANRI S, S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
6.	TITIS AYU WULANDARI.S.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	
7.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
8.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
9.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	SEKRETARIS	
10.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
11.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
12.	DORY HOSWINDA SARI, SH., MH NIP. 19790604 200604 2 001	PANMUD PIDANA	
13.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
14.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
15.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	Cuti Tahunan
16.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
17.	ANDREY SYAHWIJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
19.	IKA RIAN TI,AM.Keb.S.H NIP. 198705162011012012	PANITERA PENGGANTI	
20.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	Cuti Tahunan

23.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	
24.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	
25.	NANDA, A.Md.A.B NIP.199904282022032009	PENGOLA KEUANGAN	
26.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	CPNS	dl
27.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP.199607302024051001	CPNS	dl
28.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	CPNS	dl

TENAGA PPNP

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNP	
2	BUDIANSYAH	PPNP	
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNP	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNP	
5	FEBRI ALVANDO	PPNP	
6	FIDRIANSYAH	PPNP	

DIBUAT OLEH
KASUBAG KEPEGAWAIAN


HENDRIK

DIKETAHUI
KETUA


ARI QURNIAWAN



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II

09 JULI 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 09 Juli 2025

Nomor : III /SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNPN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan II Tahun 2025. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 09 Juni 2025
Waktu : 09.00 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan II

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No :
2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Juli 2024

Pukul : 09.00 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara
Enim.

Jalannya Rapat :

- 1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan Juni 2025
- 2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2025 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dicksekusi)	50

3. Pada Triwulan II (April - Juni) 2025 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	95,83 %	106,48 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100%	100%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	2,22 %	2,22 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	97 %	107,78 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	98,80%	109,78%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0%	0%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	104,65%	116,27%
Rata-rata capaian sasaran strategis I					90,42%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi	2	0%	0%
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,67%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis III					100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	-	-
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					-

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 45 perkara. Sampai dengan triwulan II, baru ada 1 perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Restoratif Justice	Monitoring terhadap perkara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
2.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan II, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan II, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana.
4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan II, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- DIPA 01 sebesar 100 %
 - DIPA 03 sebesar 98,35 %

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh jajaran Departemen Hukum dan Peradilan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan.

**#bangga
melayani
bangsa**

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (APR – JUN 2025)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh jajaran Departemen Hukum dan Peradilan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan.

**#bangga
melayani
bangsa**

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Gugatan	8	7	90 %	95,83 %	106,48 %
Gugatan Sederhana	5	5			
Permohonan	11	11			
TOTAL	24	23			

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh jajaran Departemen Hukum dan Peradilan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan.

**#bangga
melayani
bangsa**

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Pidana Biasa	142	142	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	17	17			
TOTAL	159	159			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Jumlah perkara yang diajukan RJ	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
45	1	50%	2.22 %	2.22 %



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW II	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
	a	b	(a-b)			
Pidana	159	4	155	90 %	97 %	107,78 %
Perdata	8	1	7			
TOTAL	167	5	162			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW II	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
	a	b	(a-b)			
Pidana	159	0	159	90 %	98, 80 %	109,78 %
Perdata	8	2	6			
TOTAL	167	0	165			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW II	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
4	0	50 %	0	0

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada perkara anak yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW II	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
99,42	95	90 %	104,65%	116,27 %



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Gugatan	8	8	100 %	100 %	100 %
Gugatan Sederhana	5	5			
Permohonan	11	11			
TOTAL	24	24			



BerAKHLAK berkeadilan berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Pidana Biasa	142	142	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	17	17			
TOTAL	159	159			



BerAKHLAK berkeadilan berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW II	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
2	0	2 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : Para Pihak yang tidak mau berdamai dan mempertahankan pendapatnya masing-masing



BerAKHLAK berkeadilan berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW II	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
2 perkara	1	1	100 %	100	100
TOTAL	1	1			



SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW II	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
49	49	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW II TAHUN 2025	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindak lanjuti (dengan ananming, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
0	-	50 %	-	-

Jumlah permohonan eksekusi : Jumlah permohonan eksekusi yang di ajukan pihak di tahun berjalan

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan : jumlah pelaksanaan eksekusi

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada permohonan eksekusi yang masuk di tahun 2024



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW II	TRW II	TRW II
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	90%	95,83%	106,48%
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	50%	2,22 %	2,22 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	97 %	107,78 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	98,80 %	109,78 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	0	0
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	104,45 %	116,27%
Rata-rata capaian sasaran Strategis I				90,42%



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TEW II	TEW II	TEW II
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II				66,67 %



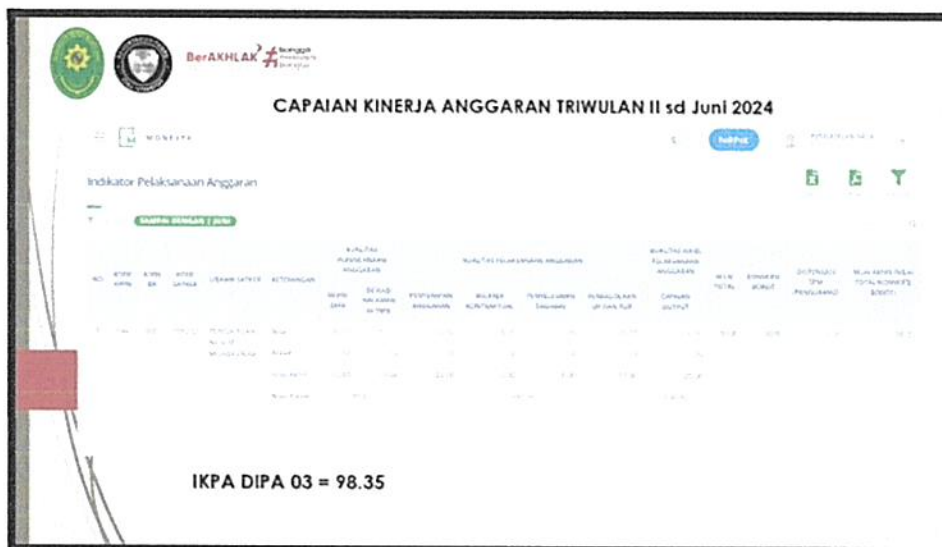
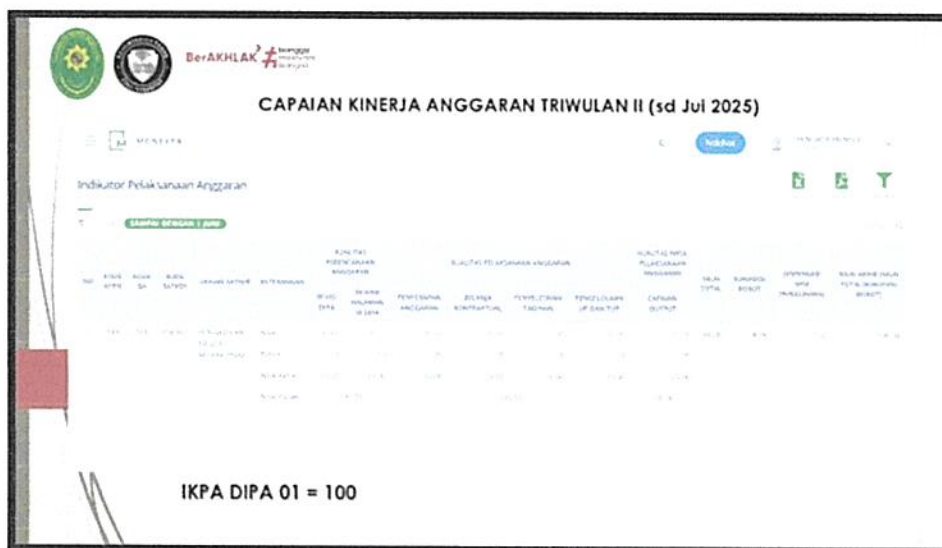
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	0%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			50 %



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase putusan perkara perdata yang dilindak lanjut (dieksekusi)	50%	-	-
Rata-rata capaian sasaran Strategis IV			-



4. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis

[Signature]

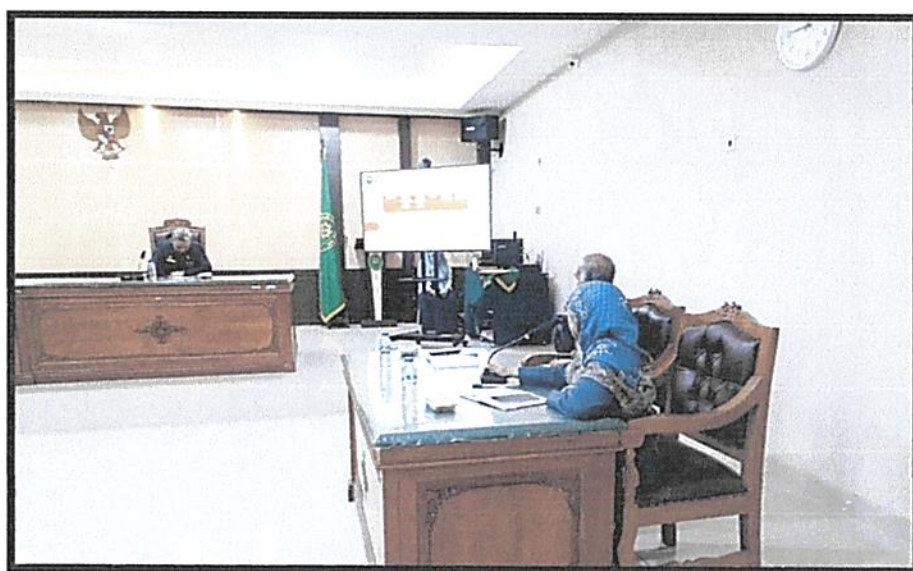
Rulita Widayanti

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

[Signature]
Ari Qurniawan

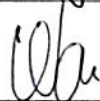
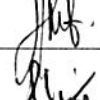
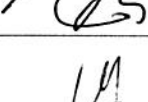
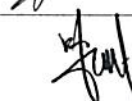


DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

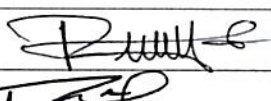
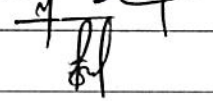


	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/KPN.W6-U6/UND.KP4.1.2/VII/2025
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	Juli 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI QURNIAWAN,S.H.,M.H. NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	MIRYANTO, SH.,MH 198401252009041003	HAKIM	
4.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
5.	SERA RICKY SWANRI S, S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
6.	TITIS AYU WULANDARI,S.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	
7.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
8.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
9.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	SEKRETARIS	
10.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
11.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
12.	DORY HOSWINDA SARI, SH., MH NIP. 19790604 200604 2 001	PANMUD PIDANA	
13.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
14.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
15.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
16.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
17.	ANDREY SYAHWIJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
19.	IKA RIANI,AM.Keb,S.H NIP. 198705162011012012	PANITERA PENGGANTI	
20.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
21.	JAMAL PAIKO,SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	
22.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
23.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	

24.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	
25.	NANDA, A.Md.A.B NIP. 199904282022032009	PENGOLA DATA DAN INFORMASI	
26.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
27.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP. 199607302024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
28.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
29.	BUDI DERMAWAN, S.T. NIP. 199305292025061007	CPNS TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	
30.	UMI SEPTIANI, A.MD. NIP. 199409142025062012	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
31.	TRI ISMARETA, A.MD. NIP. 199603282025062009	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
32.	M. WENDY PRANATA, A.MD.KOM. NIP. 199902012025061007	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
33.	RULITA WIDAYANTI, A.MD.T. 199904122025062013	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	

TENAGA PPNPN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNPN	
2	BUDIANSYAH	PPNPN	
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNPN	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNPN	
5	FEBRI ALVANDO	PPNPN	
6	FIDRIANSYAH	PPNPN	

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



HERU AGUSTIAN

DIKETAHUI
KETUA



ARI QURNIAWAN



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III

09 SEPTEMBER 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 9 Oktober 2025

Nomor : 1748 /SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan CPNS & PPPK & TKS

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Di

Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan III Tahun 2025. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis/ 9 Oktober 2025
Waktu : 09.00 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan III

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No :
2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Oktober 2025
Pukul : 09.00 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja
Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III
Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPPK Pengadilan Negeri Muara Enim.
Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan September 2025
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2025 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

3. Pada Triwulan III (Juli-September) 2025 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	97.37%	108.19%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100%	100%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	17.28%	34.28%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	96.47%	107,19%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	98.43%	109.37%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0%	%0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	104.16 %	115.73%
Rata-rata capaian sasaran strategis I					95,73%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi	2	0%	0%
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,67%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	50%	50%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis III					50%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	-	-
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					-

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - e. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 34 perkara. Sampai dengan triwulan III, baru ada 6 perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Restoratif Justice	Monitoring terhadap perkara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
2.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan III, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan III, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana.
4.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan Triwulan III ada 1 perkara yang mengajukan untuk diselesaikan dengan Prodeo	Monitoring terhadap perkara prodeo yang jika memenuhi syarat akan diajukan Prodeo
5.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan III, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - e. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - i. Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - j. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - k. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - l. Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - DIPA 01 sebesar 98.58 %
 - DIPA 03 sebesar 98.43 %

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III (JUL – SEPT 2025)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Gugatan	12	11	90 %	97,97 %	108,19 %
Gugatan Sedemana	7	7			
Permononan	19	19			
TOTAL	38	37			

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SENIA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Pidana Biasa	234	234	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	9	9			
TOTAL	243	243			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Jumlah perkara yang diajukan RJ	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
35	6	50%	17,14 %	34,28 %



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW III	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	a	b	(a-b)			
Pidana	243	6	237	90 %	96,47 %	107,19 %
Perdata	12	3	9			
TOTAL	255	9	246			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW III	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	a	b	(a-b)			
Pidana	243	2	241	90 %	98,43 %	109,37 %
Perdata	12	2	10			
TOTAL	255	4	251			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW III	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
1	0	50 %	0	0

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada perkara anak yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW III	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
98,95	95	90 %	104,16 %	115,73 %



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Gugatan	12	12	100 %	100 %	100 %
Gugatan Seadanya	7	7			
Permanonan	19	19			
TOTAL	38	38			



SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Pidana Biasa	234	234	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	9	9			
TOTAL	243	243			



SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW III	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
2	0	2 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : Para Pihak yang tidak mau berdamai dan mempertahankan pendapatnya masing-masing



SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW III	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
2 perkara	1	1	100 %	50%	50%
TOTAL	1	1			



SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW III	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
36	36	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW III TAHUN 2025	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti (dengan anmaring, sila eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
1	anmaring	50 %	-	-

Jumlah permohonan eksekusi : Jumlah permohonan eksekusi yang di ajukan pihak di tahun berjalan

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan : jumlah pelaksanaan eksekusi

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada permohonan eksekusi yang masuk di tahun 2024



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW II	TRW II	TRW II
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	90%	97,37 %	106,19 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	30%	17,14 %	34,28 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengunakan upaya hukum Banding	10 %	96,47 %	107,19 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengunakan upaya hukum Kasasi	10 %	98,43 %	109,37 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30 %	0	0
g.	Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	10 %	104,16 %	112,37 %
Rata-rata capaian sasaran				95,73%
Strategis I				



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW III	TRW III	TRW III
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II				66,67 %



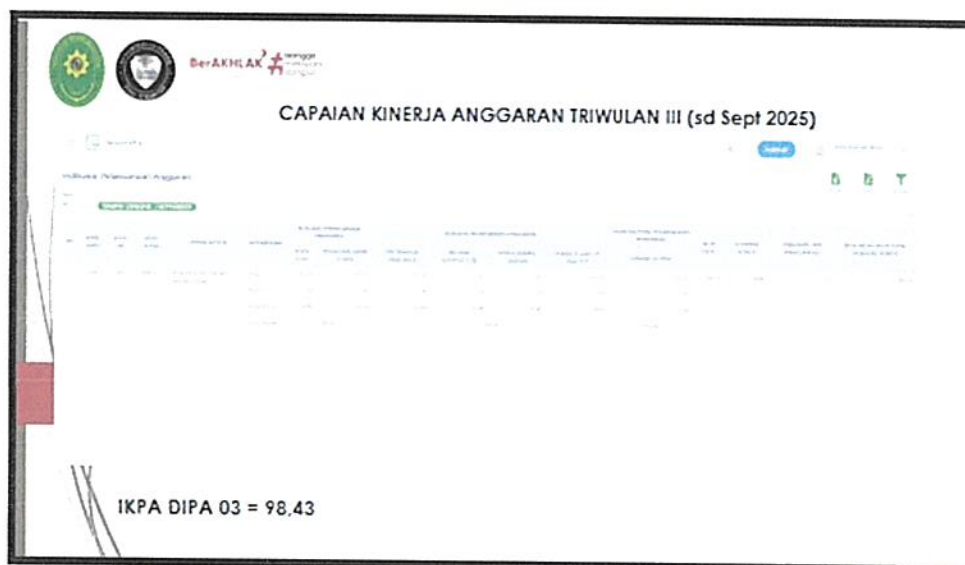
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	50%	50%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			75%



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2025	Th. 2025	Th. 2025
Persentase putusan perkara perdata yang diindikasikan lanjut (dieksekusi)	50%	-	-
Rata-rata capaian sasaran Strategis IV			-



10. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis


Desi Robiansyah

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

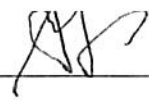
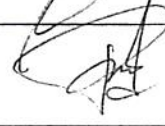
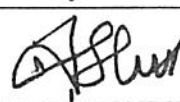
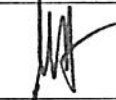
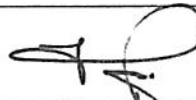
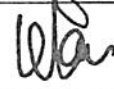
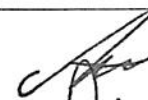
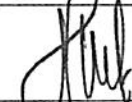
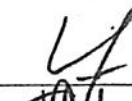

Ari Qurniawan

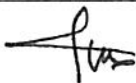
DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I



	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/X/2025
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III PADA PENGADLAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	Oktober 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI QURNIAWAN., SH., MH NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., MM.Hum NIP. 19760829 2000003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	MIRYANTO, SH., MH NIP. 198401252009041003	HAKIM	
4.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
5.	RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H. NIP. 198512262017121001	HAKIM	
6.	ANISA LESTARI, S.H., M.Kn. NIP.198802052017122003	HAKIM	
7.	EVA RACHMAWATY, S.H., M.H. NIP.198901262017122001	HAKIM	
8.	FRANS LUKAS SIANIPAR, S.H. NIP.199008052017121004	HAKIM	
9.	MUHAMAD RIDWAN, S.H. NIP.199210112017121005	HAKIM	
10.	RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, S.H., M.H. NIP.199212032017121006	HAKIM	
11.	MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. NIP.199302042017121003	HAKIM	
12.	GALIH PRAYUDO, S.H.,M.H. NIP.199310152017121003	HAKIM	Cuti tahunan.
13.	YURI ALPHA FAWNIA, S.H. NIP.199402112017122002	HAKIM	
14.	SHUNITA LAXMI DEWI, S.H. NIP.199404242017122002	HAKIM	
15.	DWI LESTARI, S.H. NIP.199411122017122003	HAKIM	Cuti tahunan
16.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
17.	HARMEN., S.H NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
18.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	SEKRETARIS	Cuti tahunan.
19.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
20.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
21.	DORY HOSWINDA SARI, SH., MH NIP. 19790604 200604 2 001	PANMUD PIDANA	
22.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	

23.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH..MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
24.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
25.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
26.	ANDREY SYAHWIJAYA, SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
27.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
28.	IKA RIANTI, AM.Keb.. S.H NIP. 198705162011012012	PANITERA PENGGANTI	
29.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
30.	JAMAL PAIKO, SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	
31.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
32.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	Cuti alasan penting
33.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	
34.	NANDA, A.Md.A.B NIP.19990428202032009	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI	
35.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
36.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP.199607302024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
37.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
38.	BUDI DERMAWAN, S.T. NIP.199305292025061007	CPNS TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	
39.	UMI SEPTIANI, A.MD. NIP. 199409142025062012	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
40.	TRI ISMARETA, A.MD. NIP.199603282025062009	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
41.	M. WENDY PRANATA, A.MD.KOM. NIP.199902012025061007	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
42.	RULITA WIDAYANTI, A.MD.T. NIP.199904122025062013	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
43.	HERU AGUSTIAN, S.H. NIP. 199411202025211039	PPPK/PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
44.	FEBRI ALVANDO NIP. 199905072025211018	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
45.	FIDRIANSYAH NIP. 199303242025211045	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
46.	DESI ROBIANSYAH NIP. 199612092025211024	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

47	ENCEP SYAMSUL BAHRI NIP. 197306222025211012	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
48	BUDIANSYAH NIP. 199109032025211031	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



ENCEP SYAMSUL BAHRI

DIKETAHUI
KETUA



ARI QURNIAWAN



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
RAPAT CAPAIAN ANGGARAN 2025
DAN CAPAIAN KINERJA IKU 2025
TRIWULAN IV

13 JANUARI 2026
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 12 Januari 2026

Nomor : 266 /KPN.W6-U6/UND.KP4.1.2/I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja IKU 2025 Triwulan IV
Pengadilan Negeri Muara Enim

Yth. Bapak/Ibu para Hakim, Paitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional, Pegawai dan PPPK
Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja
IKU 2025 Triwulan IV Pengadilan Negeri Muara Enim. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan
kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 13 Januari 2026
Waktu : 08.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Dr. Kusuma Adtmaja PN Muara Enim
Acara : Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja IKU 2025
Triwulan IV Pengadilan Negeri Muara Enim

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.
Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULA

Dasar : 1. PERMA No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan
Peradilan Umum Lainnya;
Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026
Pukul : 08.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja IKU 2025 Triwulan IV
pada Pengadilan Negeri Muara Enim
Peserta Rapat : Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, ASN dan PPPK Pengadilan Negeri
Muara Enim Kelas IB

Jalannya Rapat :

1. Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja IKU 2025 Triwulan IV dilaksanakan
berbarangan dengan Rapat Bulanan Bulan Desember 2025
2. Rapat Capaian Anggaran 2025 dan Capaian Kinerja IKU 2025 Triwulan IV dibawa oleh
Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim Ibu Yurika Ariani, S.T., M.M dengan
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Anggaran Tahun 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
serapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 DIPA 01 persentasenya sebesar
97.87% dan untuk sisa anggarannya sebesar Rp 145.737.853 dengan rincian Belanja
Pegawai Rp 73.435.819, Belanja Barang Rp14.328.034 dan Belanja Modal Rp
75.974.000.

Ket	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	5.214.009.000	1.241.340.000	398.974.000	6.854.323.000
REALISASI	5.140.573.181	1.227.011.966	341.000.000	6.708.585.147
PERSENTASE	(98.59%)	(98.85%)	(85.47%)	(97.87%)
SISA	73.435.819	14.328.034	57.974.000	145.737.853

- Nilai IKPA Tahun 2025 DIPA 01 sebesar 98,58 terdiri dari 3 komponen yaitu:
 1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan
 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Jatuhnya nilai IKPA yaitu pada Komponen Kualitas Perencanaan Anggaran dengan deviasi Halaman III DIPA 90.52 namun dengan total nilai akhir 98.58 maka Nilai IKPA pada Tahun 2025 DIPA 01 sudah sangat baik karena nilainya sudah diatas/ lebih dari 95.

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
098991	Nilai	100	90,52	100	100	100	100	100	98,58	100%	0	98,58
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10	13,58	20	10	10	10	25				
	Nilai Aspek	95,26		100				100				

- Nilai IKPA pada bulan Agustus yaitu 100 sehingga pada periode Agustus mendapatkan nomor 1 (satu), namun pada bulan September nilai IKPA jatuh pada Deviasi Halaman III DIPA komponen Kualitas Perencanaan Anggaran dikarenakan pada saat penyusunan RPD dibulan Juli sebesar Rp 293.592.514 tetapi peyerapannya melewati Rp 583.430.898 disebabkan adanya Selip karena adanya PPPK yang diangkat dan adanya penambahan Hakim 11 Orang sehingga pada periode September mendapatkan nomor 15 (Lima Belas).

BULAN	Rencana Penarikan Dana			Penyerapan			Deviasi			% Deviasi			% Deviasi	% Rata-Rata	Nilai IKPA
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3			
'01	278.882.658	28.051.558	0	278.882.662	28.051.575	0	4	17	0	0	0	0	0	0	100
'02	292.955.788	115.974.303	0	292.955.788	144.517.870	0	0	28.543.482	0	0	24,61	0	0	0	100
'03	585.911.575	95.700.470	0	595.838.233	106.770.733	0	9.926.658	11.070.263	0	1,69	11,57	0	0	0	100
'04	295.287.078	70.000.000	0	295.287.079	69.813.243	0	1	186.757	0	0	0,27	0	0,07	0,02	100
'05	295.287.078	120.000.000	0	293.592.516	115.147.324	0	1.694.562	4.852.676	0	0,57	4,04	0	1,42	0,3	100
'06	595.838.233	105.000.000	0	612.029.462	110.264.686	0	16.191.229	5.264.686	0	2,72	5,01	0	3,09	0,76	100
'07	293.592.514	120.000.000	0	310.046.547	117.949.254	0	16.454.033	2.050.746	0	5,6	1,71	0	4,22	1,26	100
'08	293.592.514	120.300.000	398.974.000	320.900.547	110.264.092	341.000.000	27.306.033	10.035.908	57.974.000	9,3	8,34	14,53	9,47	2,28	100
'09	293.592.514	120.000.000	0	583.430.898	119.999.581	0	289.838.384	419	0	98,72	0	0	66,97	9,47	90,53
'10	494.377.134	119.999.995	0	530.821.146	120.473.705	0	36.444.012	473.710	0	7,37	0,39	0	5,5	9,07	90,93
'11	495.000.000	100.300.000	57.974.000	541.974.889	100.286.760	0	46.974.889	13.240	57.974.000	9,49	0,01	100	13,5	9,48	90,52
'12	495.000.000	100.300.000	57.974.000	541.974.889	100.286.760	0	46.974.889	13.240	57.974.000	9,49	0,01	100	13,5	9,48	90,52

Nilai IKPA Satker per Kategori
Periode Agustus 2025 (cut-off 9 September 2025 Pukul 17.00 WIB)

Sangat Baik (>= 95)			
Peringkat	Kode Satker	Nama Satker	Nilai IKPA
1	005-098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	100
2	066-682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	99,98
3	005-402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	99,94
4	005-402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	99,91
5	054-428270	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAHAT	99,86
6	054-673521	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. EMPAT LAWANG	99,79
7	060-111714	POLRES EMPAT LAWANG	99,74
8	025-309374	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAHAT	99,58
9	025-418511	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT	99,49
10	015-506126	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT	99,24

Nilai IKPA Satker per Kategori
Periode September 2025 (cut-off 8 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB)

Sangat Baik (>= 95)			
Peringkat	Kode Satker	Nama Satker	Nilai IKPA
1	025-309374	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAHAT	100
	025-418511	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT	100
	054-428264	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MUARA ENIM	100
	054-428270	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAHAT	100
	054-673521	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. EMPAT LAWANG	100
2	060-654872	POLRES PAGAR ALAM	99,98
3	066-682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	99,98
4	005-402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	99,79
5	005-402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	99,74
6	137-692708	BALAI PENYAYARAN KELAS II LAHAT	99,52
7	060-111714	POLRES EMPAT LAWANG	99,74
8	137-692332	LAPAS KELAS II A LAHAT	99,21
9	005-402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	99,12
10	005-402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	99,09
11	060-641660	POLRES MUARA ENIM	99,07
12	025-418507	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT	98,97
13	060-641677	POLRES LAHAT	98,92
14	054-652212	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAGAR ALAM	98,73
15	066-682892	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGAR ALAM	98,73
16	005-098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	98,58

- Anggaran Tahun 2025 terdiri dari Belanja Barang serapan anggran sampai dengan akhir Desember 2025 DIPA 03 persentasenya sebesar 97.90% dan untuk sisa anggarannya sebesar Rp 6.778.850 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima puluh Rupiah).

Ket	Barang	Total
PAGU	323.391.000	323.391.000
REALISASI	316.612.150	316.612.150
PERSENTASE	(97.90%)	(97.90%)
SISA	6.778.850	6.778.850

- Dan untuk Nilai IKPA Tahun 2025 DIPA 03 sebesar 98.53 dan ini juga jatuhnya pada Deviasi Halaman III DIPA Kualitas Perencanaan Anggaran dikarenakan pada saat penyusunan RPD dibulan Juli sebesar Rp 16.965.998 tetapi peyerapannya melewati Rp 24.723.000

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	92,97	100	0	0	98,75	100	78,82	80%	0	98,53
Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
Nilai Akhir	10	13,95	20	0	0	9,88	25				
Nilai Aspek	96,49		99,38				100				

3. Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim Ibu Yurika Ariani, S.T., M.M melanjutkan dengan Menyampaikan Capaian Kinerja IKU 2025 Triwulan IV dengan hal-hal sebagai berikut:
- PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2025 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%

		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	8%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3

- Pada Triwulan IV (Januari - Desember) 2025 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98,5%	109,4%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	86,21%	107,76%

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	66.67%	133.34%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	8%	8.38%	104.75%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2%	3.23%	161,5%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%	25%	250%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran strategis I					122.23%
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6%	3.98%	110.5%
Rata-rata capaian sasaran strategis II					110.5%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	71%	79.52%	112.5%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan	90%	98.55%	109,5%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70%	92.5%	132.14%
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3%	3,23%	107,7%
Rata-rata capaian sasaran strategis III					115,46%

4. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.

- e. Perbaiki unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - i. Pengembangan kompetensi SAN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non kalasikal), Peningkatan jenjang Pendidikan, Perbaikan kinerja dan kedisiplinan.
 - j. Perbaiki perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK pada triwulan IV.
 - k. Melaksanakan rapat rutin evaluasi kinerja anggran setiap triwulan.
 - l. Melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap kinerja anggran melalui aplikasi OMSPAN.
 - m. Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan angran baik Belanja Gaji (51), Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53).
5. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
 6. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
 7. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - DIPA 01 sebesar 98.58 %
 - DIPA 03 sebesar 98.53 %

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA





BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus Jan - Des	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Perdata	112	98	90 %	98.6 %	109.4 %
Pidana	818	818			
TOTAL	930	916			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 2 : PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRMAN SAUNAN PUTUSAN PIDANA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Perkara	Jumlah perkara putus Jan - Des	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Perdata	112	112	100 %	100 %	100 %
Pidana	818	818			
TOTAL	930	930			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 3 : PERSENTASE PENGIRMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN KEPADA PARA PIHAK

PERDATA

Perkara	Jumlah perkara putus Jan - Des	Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Banding	6	6	100 %	100 %	100 %
Kasasi	4	4			
Peninjauan Kembali	2	2			
TOTAL	12	12			



BerAKHLAK

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 3 : PERSENTASE PENGIRMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN KEPADA PARA PIHAK

PIDANA

Perkara	Jumlah perkara putus Jan - Des	Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Banding	19	19	100 %	100 %	100 %
Kasasi	5	5			
Peninjauan Kembali	1	1			
TOTAL	25	25			



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 4 : PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA

PIDANA

Jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Jan - Des	Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
25	25	100%	100%	100%



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 5 : PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

HUKUM

Jumlah putusan yang telah dimutasi Jan - Des	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
928	800	80%	86,21%	107,76%



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 6 : PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

PERDATA

Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi Jan - Des 2025	Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
3	2	50 %	66,67%	133,34 %



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 7 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

PIDANA

Jumlah perkara yang diajukan RJ Jan - Des	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
167	18	8 %	8,38 %	104,75 %



BerAKHLAK
Berkeadilan
Berkepercayaan
Berkepastian

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 8 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

PERDATA

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi Jan - Des	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
31	1	2 %	3,23%	161,5%



BerAKHLAK
Berkeadilan
Berkepercayaan
Berkepastian

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 9 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

PIDANA

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi Jan - Des	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
8	2	10 %	25%	250%



BerAKHLAK
Berkeadilan
Berkepercayaan
Berkepastian

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 10 : PEsENTASE PERKARA PERDATA, YANG MENGGUNAKAN E-COURT

PERDATA

Perkara	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan Jan - Des	Jumlah Perkara Perdata tingkat pertama yang diajukan Menggunakan E-court	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Gugatan	31	31	100 %	100 %	100 %
Gugatan Searahana	16	16			
Permohonan	42	42			
TOTAL	89	89			



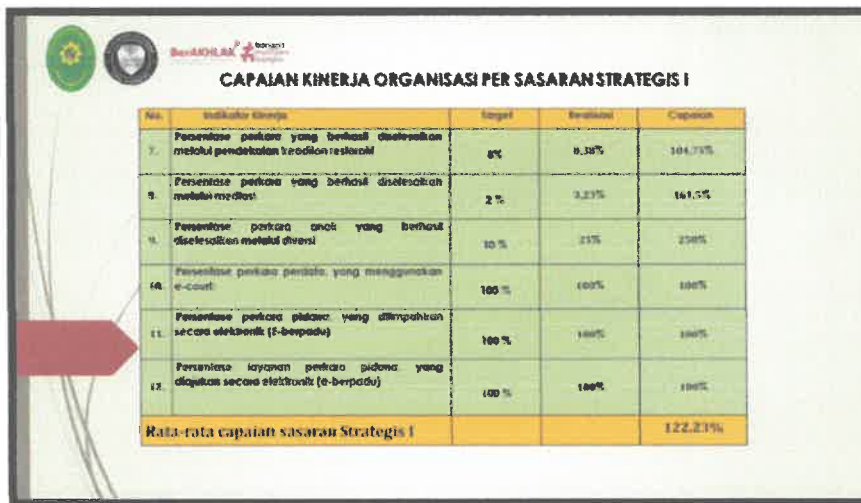
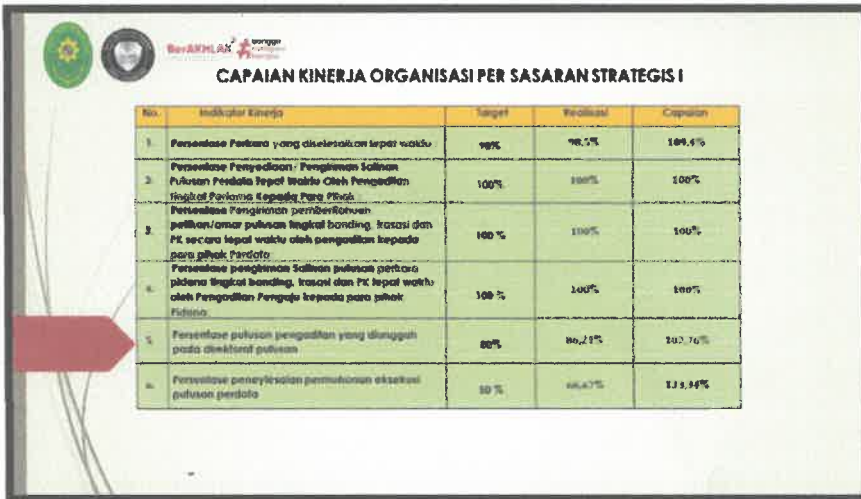
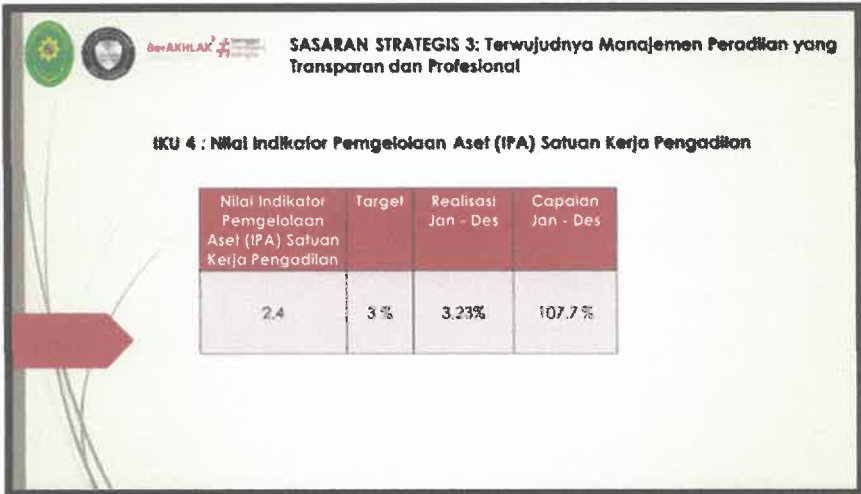
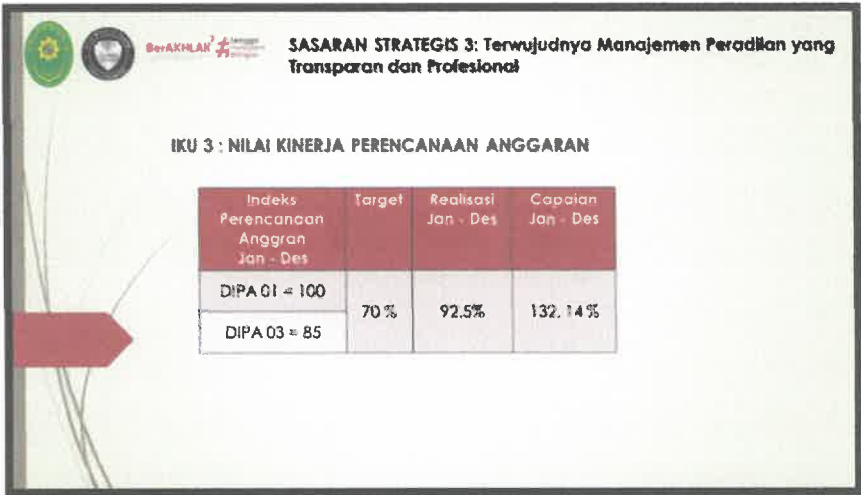
BerAKHLAK
Berkeadilan
Berkepercayaan
Berkepastian

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

IKU 11 : PEsENTASE PERKARA PIDANA, YANG DILIMPANKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

PIDANA

Perkara	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Jan - Des	Jumlah Perkara Pidana Yang dilimpahkan secara elektronik	Target	Realisasi Jan - Des	Capaian Jan - Des
Pidana Biasa	777	777	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	39	39			
TOTAL	816	816			





BerAKHLAK

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	88 %	998%	110.5 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II			110.5%



BerAKHLAK

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Seluruh Kerja Pengadilan	71 %	79,52%	112,5%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IPA) Seluruh Kerja Pengadilan	70 %	98,88%	109,8%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90 %	96,5%	132,14%
Nilai Indikator Pengelolaan Asset (IPA) Seluruh Kerja Pengadilan	3%	3,32%	107,7%
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			115,46%

8. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis



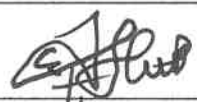
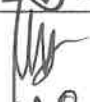
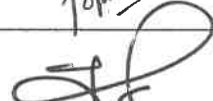
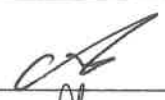
Desi Robiansyah



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Muara
Enim
Ari Qurniawan

	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	266 /KPN.W6-U6/ UND.KP4.1.2/I/2026
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT CAPAIAN ANGGARAN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA IKU 2025 TRIWULAN IV PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Tanggal	JUNI 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI QURNIAWAN., SH., MH NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	MIRYANTO, SH., MH NIP. 198401252009041003	HAKIM	
3.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
4.	RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H. NIP. 198512262017121001	HAKIM	
5.	ANISA LESTARI, S.H., M.Kn. NIP.198802052017122003	HAKIM	
6.	EVA RACHMAWATY, S.H., M.H. NIP.198901262017122001	HAKIM	
7.	FRANS LUKAS SIANIPAR, S.H. NIP.199008052017121004	HAKIM	
8.	MUHAMAD RIDWAN, S.H. NIP.199210112017121005	HAKIM	Cuti tahunan
9.	RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, S.H., M.H. NIP.199212032017121006	HAKIM	
10.	MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. NIP.199302042017121003	HAKIM	
11.	GALIH PRAYUDO, S.H.,M.H. NIP.199310152017121003	HAKIM	
12.	YURI ALPHA FAWNIA, S.H. NIP.199402112017122002	HAKIM	
13.	SHUNITA LAXMI DEWI, S.H. NIP.199404242017122002	HAKIM	
14.	DWI LESTARI, S.H. NIP.199411122017122003	HAKIM	
15.	HARMEN., S.H NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
16.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	SEKRETARIS	
17.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
18.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
19.	DORY HOSWINDA SARI, SH., MH NIP. 19790604 200604 2 001	PANMUD PIDANA	
20.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
21.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
22.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	Cuti tahunan

23.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
24.	ANDREY SYAHWIJAYA, SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
25.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
26.	IKA RIANI, AM.Keb., S.H NIP. 198705162011012012	PANITERA PENGGANTI	
27.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	Cuti tahunan
28.	JAMAL PAIKO, SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	
29.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
30.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	
31.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	
32.	NANDA, A.Md.A.B NIP.19990428202032009	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI	
33.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
34.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP.199607302024051001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
35.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
36.	BUDI DERMAWAN, S.T. NIP.199305292025061007	CPNS TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	
37.	UMI SEPTIANI, A.MD. NIP. 199409142025062012	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
38.	TRI ISMARETA, A.MD. NIP.199603282025062009	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
39.	M. WENDY PRANATA, A.MD.KOM. NIP.199902012025061007	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
40.	RULITA WIDAYANTI, A.MD.T. NIP.199904122025062013	CPNS DOKUMENTALIS HUKUM	
41	HERU AGUSTIAN, S.H. NIP. 199411202025211039	PPPK/PENATA LAYANAN OPERASIONAL	
42	FEBRI ALVANDO NIP. 199905072025211018	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
43	FIDRIANSYAH NIP. 199303242025211045	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
44	DESI ROBIANSYAH NIP. 199612092025211024	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
45	ENCEP SYAMSUL BAHRI NIP. 197306222025211012	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

46	BUDIANSYAH NIP. 199109032025211031	PPPK/OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
----	---------------------------------------	--------------------------------------	---

**DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI**



ENCEP SYAMSUL BAHRI

**DIKETAHUI
KETUA**



ARI QURNIAWAN

	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/KPN.W6-06/UND.KP4.1.2/1/2026
		Revisi	00
	FOTO DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN ANGGARAN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA IKU 2025 TRIWULAN IV PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Tanggal	13 Januari 2026
	Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim	Halaman	1

